

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA
DESA-DESA KECAMATAN PANGKALAN SUSU**

TUGAS AKHIR

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak)*



Oleh:

Nama : Kelly Davinci
NPM : 2005170135
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : KELLY DAVINCI
NPM : 2005170135
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Tugas Akhir : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA-DESA KECAMATAN PANGKALAN SUSU

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Henny Zurika Lubis, S.E., M.Si.)

Penguji II

(Surti Suryana, S.E., M.M.)

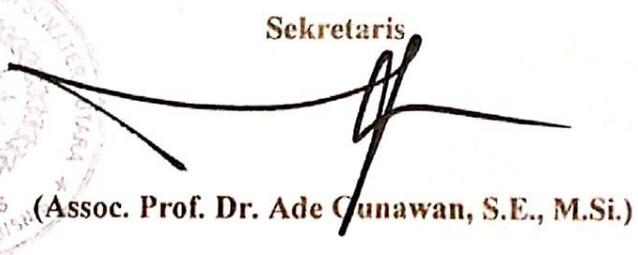
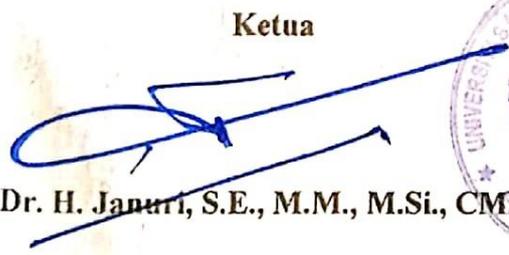
Pembimbing

(Sukma Lesmana, S.E., M.Si., Ph.D)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris



Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA. (Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : KELLY DAVINCI

N.P.M : 2005170135

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA
DESA-DESA KECAMATAN PANGKALAN SUSU

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, 2024

Pembimbing Skripsi

(SUKMA LESMANA, S.E., M.Si, Ph.D.)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

oc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E, M.M, M.Si, CMA)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Kelly Davinci
NPM : 2005170135
Dosen Pembimbing : Sukma Lesmana, S.E., M.Si, Ph.D.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa-desa Kecamatan Pangkalan Susu

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1			
Bab 2			
Bab 3			
Bab 4	- Bab 4 Lipis sesuai pedoman - Di Analisa Data perlu dijabarkan deskripsi Data dg karakteristik data setiap variabel	9/9/24	
Bab 5	- Perlu dijabarkan detail dg karakteristik variabel	10/19-24	
Daftar Pustaka			
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc Subesri ditimbrang	11/9-24	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE, M.Si

Medan, September 2024
Dosen Pembimbing

SUKMA LESMANA, S.E., M.Si, Ph.D.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap : Kelly Davinci

N.P.M : 2005170135

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bawah tugas akhir saya yang berjudul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa-Desa Kecamatan Pangkalan Susu**” adalah bersifat asli (*original*), kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



KELLY DAVINCI

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA-DESA KECAMATAN PANGKALAN SUSU

KELLY DAVINCI

Program Studi: Akuntansi

Email: kellydavinci@gmail.com

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa-Desa di Kecamatan Pangkalan susu. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di 9 desa yang terdapat pada Kecamatan Pangkalan Susu. Populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari 36 orang yang masing-masing merupakan kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan kaur keuangan dari 9 desa yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan diukur menggunakan skala *Likert*. Sedangkan Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan SEM-PLS dengan bantuan *software WarpPLS v 8.0*. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kompetensi Aparatur Desa secara parsial dan signifikan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. (2) Komitmen Organisasi secara parsial dan signifikan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. (3) Transparansi secara parsial dan signifikan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

**Kata Kunci: Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Transparansi,
Akuntabilitas Pengelolaan dana desa.**

ABSTRACT

Analysis of Factors Affecting Accountability of Village Fund Management in Villages in Pangkalan Susu District

KELLY DAVINCI

Departement of Accounting

Email: kellydavinci@gmail.com

The purpose of this study is to determine the effect of Village Apparatus Competence, Organizational Commitment and Transparency on the Accountability of Village Fund Management in Villages in Pangkalan Susu District. The type of research conducted is quantitative research. This research was conducted in 9 villages in Pangkalan Susu District. The population and sample in this study consisted of 36 people, each of whom was a village head, village secretary, village treasurer and finance head from 9 villages studied. The data source used in this study is primary data obtained using a questionnaire and measured using *the Likert* scale. Meanwhile, the data analysis technique in this study uses SEM-PLS with the help of *WarpPLS software v 8.0*. The results in this study show that: (1) The competence of the Village Apparatus partially and significantly has no effect on the Accountability of Village Fund Management. (2) The Organization's commitment partially and significantly has no effect on the Accountability of Village Fund Management. (3) Transparency partially and significantly affects the Accountability of Village Fund Management.

Keywords: Village Apparatus Competence, Organizational Commitment, Transparency, Accountability of village fund management.

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kita panjatkan atas kehadiran kepada Allah SWT yang mana telah memberikan nikmat berupa Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat mengerjakan serta menyelesaikan tugas akhir ini. Adapun tugas akhir ini penulis buat untuk menyelesaikan pendidikan S-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Saya sebagai penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih kurang sempurna dalam hal isi dan penggunaan bahasa, sehingga penulis memohon kritik dan saran yang membangun untuk penulisan yang selanjutnya. Dengan pengetahuan yang terbatas penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA-DESA KECAMATAN PANGKALAN SUSU”**.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan selama penyusunan proposal. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayahanda Suwito dan ibunda tercinta Deny Indriani.

Terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan atas segala bentuk bantuan, dukungan, semangat, nasihat dan doa yang diberikan selama ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. H. Januri S.E., M.M, M.Si selaku Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan S.E., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Riva Ubar Harahap, SE. Ak, M.Si CA, CPA selaku sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Sukma Lesmana, SE., M.Si, Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing saya dalam proses penyusunan proposal proposal ini.
9. Seluruh Dosen dan Staf Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak membantu saya dalam pengumpulan berkas dan administrasi.
10. Adik terkasih, wildan Adrian dan Aisha Syabaniah. Yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Tetap semangat dalam menjalani perkuliahan dan sekolahnya semoga diperlancar segala urusannya.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan, Nurul Devani Br. Ginting, Mutiara Safitri, Salsabila Izza Tanzela dan Muslika Fauzani. Yang telah mendukung dan memberikan semangat dalam proses penulisan tugas akhir ini.

12. Seluruh teman-teman Program Studi Akuntansi Angkatan 2020 dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan doa, dukungan, serta kritik dan saran kepada penulis dalam proses penyusunan tugas akhir ini.

13. *Last but not least*, kepada diri saya sendiri terima kasih telah berjuang sejauh ini dan memilih untuk tidak menyerah dalam kondisi apapun, saya bangga pada diri saya sendiri bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh lika-liku kehidupan yang dijalani.

Akhirnya atas segala bantuan serta motivasi yang diberikan kepada peneliti dari berbagai pihak selama ini, maka proposal ini dapat diselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Peneliti tidak dapat membalasnya kecuali dengan doa dan puji syukur kepada Allah SWT dan salawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih semoga proposal ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat memperluas cakrawala pemikiran kita dimasa yang akan datang dan berharap sekripsi ini dapat menjadi lebih sempurna kedepannya.

Medan, September 2024

Penulis

Kelly Davinci

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Batasan Masalah	11
1.4 Rumusan Masalah	12
1.5 Tujuan Penelitian	12
1.6 Manfaat Penelitian	12
BAB II	14
KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori	14
2.2 Penelitian Terdahulu	29
2.3 Kerangka Konseptual	32
2.4 Hipotesis	35
BAB III	36
METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Definisi Operasional	36
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	38
3.4 Populasi dan Sampel	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data	39
3.6 Teknik Analisis Data	40
BAB IV	46
HASIL PENELITIAN	46
4.1 Deskripsi Data	46
4.2 Analisis Data	51

BAB V.....	65
PENUTUP.....	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran.....	66
5.3 Keterbatasan Penelitian	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Dana Desa Kecamatan Pangkalan Susu.....	2
Tabel 1. 2 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa.....	5
Tabel 1. 3 Jumlah Desa Yang Terlambat Menyampaikan Laporan Dana Dana.....	7
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel.....	37
Tabel 3. 2 Daftar Nama Desa di Kecamatan Pangkalan Susu	38
Tabel 3. 3 Rencana Penyusunan Proposal.....	38
Tabel 3. 4 Skor Penilaian Pada Kuesioner	40
Tabel 3. 5 <i>Rule of Thumb</i> Evaluasi Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	44
Tabel 4. 1 Usia Responden.....	47
Tabel 4. 2 Jenis Kelamin Responden	47
Tabel 4. 3 Pendidikan Responden.....	47
Tabel 4. 4 Masa Kerja Responden	48
Tabel 4. 5 Kriteria Jawaban Responden.....	48
Tabel 4. 6 Skor Angket Variabel Kompetensi Aparatur Desa.....	49
Tabel 4. 7 Skor Angket Variabel Komitmen Organisasi	49
Tabel 4. 8 Skor Angket Variabel Transparansi.....	50
Tabel 4. 9 Skor Angket Variabel Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa.....	50
Tabel 4. 10 Statistik Deskriptif	51
Tabel 4. 11 Hasil Nilai Outer Loading Awal	54
Tabel 4. 12 Hasil Nilai Outer Loading Setelah Eliminasi.....	55
Tabel 4. 13 Hasil Nilai <i>Average Varian Extracted</i> (AVE)	56
Tabel 4. 14 Hasil Nilai Composite Reability	56
Tabel 4. 15 Hasil Nilai AVE dan Korelasi Variabel Laten.....	57
Tabel 4. 16 Hasil Nilai <i>Cross Loading</i>	58
Tabel 4. 17 Hasil Uji R Square	59
Tabel 4. 18 Hasil Uji Hipotesis.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	35
Gambar 4. 1 Outer Model	53
Gambar 4. 2 Inner Model	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Kuesioner Penelitian.....	73
Lampiran 1. 2 Data Responden.....	79
Lampiran 1. 3 Recap Data Penelitian Variabel Kompetensi Aparatur Desa	80
Lampiran 1. 4 Recap Data Penelitian Variabel Komitmen Organisasi.....	81
Lampiran 1. 5 Recap Data Penelitian Variabel Transparansi	82
Lampiran 1. 6 Recap Data Variabel akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	83
Lampiran 1. 7 Output WarpPLS	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pegelolaan dana desa muncul diawali dengan adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dimana dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengamanatkan pemerintah desa agar lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya yaitu pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya kewenangan yang diberikan undang-undang ini menjadikan desa harus mampu melakukan secara mandiri dalam pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Maka diharapkan desa dapat berkembang menjadi suatu wilayah yang maju, mandiri dan demokratis.

Untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan demokratis, membutuhkan anggaran dalam Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat di suatu desa. Anggaran tersebut diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) NO. 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang menyebutkan bahwa dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dikelola oleh Masyarakat yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat desa (Makalalag et al., 2017). Dan tentunya dalam hal ini pemerintah desa tidak mengelola dana desa dalam jumlah sedikit, melainkan mengelola dana dalam jumlah banyak. Setiap desa akan mengelola anggaran berupa dana desa yang akan diterima secara bertahap.

Salah satunya ini dirasakan oleh desa-desa yang terdapat pada kecamatan pangkalan susu. Hal ini dapat dilihat dari adanya data yang penulis dapatkan atas

pembagian dana desa yang setiap tahunnya yang diberikan kepada desa-desa yang terdapat pada Kecamatan Pangkalan Susu untuk membantu desa dalam Pembangunan fisik maupun non fisik seperti meningkatkan Pembangunan, pembinaan, pelayanan dan pemberdayaan pada Masyarakat desa, hingga akhirnya dapat membuat desa tersebut menjadi mandiri dan Sejahtera masyarakatnya.

Berikut adalah berupa daftar besaran dana desa yang dikelola setiap desa di kecamatan pangkalan susu antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Dana Desa Kecamatan Pangkalan Susu

NAMA DESA	TAHUN		
	2021	2022	2023
Alur Cempedak	Rp 813.953.000	Rp 879.230.000	Rp 880.300.000
Sei Siur	Rp 1.127.715.000	Rp 1.106.996.000	Rp 895.225.000
Tanjung Pasir	Rp 876.168.000	Rp 929.836.000	Rp 904.388.000
Paya Tampak	Rp 755.595.000	Rp 743.715.000	Rp 864.374.000
Pintu Air	Rp 776.439.000	Rp 774.897.000	Rp 759.578.000
Sei Meran	Rp 800.176.000	Rp 790.478.000	Rp 898.354.000
Pulau Sembilan	Rp 873.512.000	Rp 843.993.000	Rp 838.491.000
Pulau Kampai	Rp 1.370.762.000	Rp 1.069.728.000	Rp 1.185.878.000
Pangkalan Siata	Rp 904.644.000	Rp 949.535.000	Rp 1.159.129.000

Sumber: Kasi PMD Kecamatan Pangkalan Susu

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 desa-desa pada kecamatan Pangkalan Susu telah menerima anggaran dana desa tiap tahunnya dan tentunya memiliki jumlah yang sangat berbeda-beda tiap tahunnya yang disebabkan oleh adanya perhitungan anggaran dana desa yang didasarkan pada jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat geologis (Zulkifli et al., 2021). Oleh karena itu, pemerintah desa dalam mengelola dana desa tetap harus menyesuaikannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu secara efisien,

ekonomis, efektif, transparan dan penuh pertanggungjawaban dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan serta mengutamakan kepentingan Masyarakat setempat sehingga dapat terwujud tata Kelola pemerintah desa yang baik (*Good Village Governance*).

Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, dijelaskan dalam peraturan Menteri dalam negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Yang menyatakan bahwa proses pengelolaan dana desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran (Zulkifli et al., 2021). Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintergritas antara satu tahap dengan tahapan-tahapan yang lainnya. Siklus pengelolaan keuangan tidak akan berjalan tanpa adanya tata Kelola pemerintahan desa yang baik. Oleh karna itu, dalam pengelolaan dana desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good governance*), Konsep good governance merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh sektor publik khususnya adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih responsif atau cepat dan tanggap (Sari, 2012).

Pengelolaan keuangan yang bersifat akuntabel adalah harapan dan keinginan bagi setiap organisasi pemerintahan, baik itu ditingkat pusat ataupun daerah. Tuntutan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa kini menjadi fokus penting bagi perangkat desa, sebab akuntabilitas menunjukkan keberhasilan tercapainya visi dari Undang-Undang Desa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Akuntabilitas menunjukkan bahwa pejabat publik telah bertindak dengan benar,

berperilaku etis, serta bertanggungjawab atas kinerjanya, sehingga tidak akan menimbulkan potensi penyelewangan yang dilakukan oleh pihak berkepentingan (Dewi & Gayatri, 2019). Dengan kata lain, akuntabilitas menjadi tolak ukur komitmen yang dimiliki aparatur desa terhadap organisasi dan Masyarakat yang dipimpinnya, maka dari itu akuntabilitas sangat penting keberadaannya dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan fenomena prinsip akuntabilitas diatas, bahwa untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tidak terlepas dari adanya kompetensi yang dimiliki oleh setiap aparatur desa. Kompetensi aparatur merupakan kualitas yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan. kemampuan aparatur dalam mengelola keuangan (memahami peraturan pengelolaan dana desa). Kegagalan dalam memahami hal ini dapat mengakibatkan kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan terjadi ketidaksesuaian antara laporan keuangan dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah (Setyowati et al., 2016), sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian informasi yang diterima Masyarakat dan hal ini tentu saja dapat mempengaruhi Keputusan yang akan diambil selanjutnya. Oleh karena itu, untuk pengelolaan dana desa yang baik maka pemerintahan desa yang bersangkutan harus mempunyai sumber daya yang berkualitas, tentunya didukung dengan latar belakang Pendidikan akuntansi dan tentunya memiliki pengalaman di bidang keuangan.

Terkait dengan kondisi kompetensi aparatur desa, muncul faktor baru yaitu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Tujuan utama dari manajemen sumber daya manusia adalah menyiapkan dan mewujudkan sumber daya yang berkualitas,

kompetensi sumber daya manusia dianggap memenuhi kriteria jika sumber daya manusia ini dapat mewujudkan tujuan Lembaga dengan memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas. Tinggi rendahnya kompetensi yang dimiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dalam suatu organisasi atau Lembaga pemerintah, akan menentukan kualitas dari organisasi tersebut. Kompetensi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan Pasal 1 Ayat 10 dijelaskan sebagai kemampuan kerja pada setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standart yang ditetapkan.

Tabel 1. 2 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa

Tingkat Pendidikan			
SMA	D3	S1 EKONOMI	S1 LULUSAN LAIN
27 Orang	2 Orang	1 Orang	6 Orang

Sumber : Kasi PMD Kecamatan Pangkalan Susu

Berdasarkan table 1.2 dapat dilihat bahwa taraf Pendidikan aparatur desa Kecamatan Pangkalan Susu yang ada di Kabupaten Langkat masih banyak terdapat pegawai yang hanya lulus SMA ini menyebabkan kurangnya fungsi kinerja yang sesuai dengan penempatan Pendidikan.

Fenomena yang terjadi pada kompetensi aparat desa khususnya di Kecamatan Pangkalan Susu menunjukkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan dana desa masih rendah. Masih terdapat kekurangan sumber daya manusia terkait dengan jenjang Pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya, misalnya dalam pengelolaan keuangan dana desa yang bukan lulusan akuntansi. Keterbatasan SDM pemerintah desa menjadi penghambat penyaluran

dana desa di sejumlah daerah. Dengan demikian, kualitas SDM sangatlah penting untuk dapat memaksimalkan pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN. Selain itu, kemampuan Sebagian besar SDM yang bertanggung jawab mengelola keuangan desa juga perlu diperhatikan. Kurangnya pemahaman aparatur desa mengenai pengelolaan dana desa karena Tingkat Pendidikan yang tidak sesuai merupakan salah satu faktor kompetensi aparatur desa, yang mungkin mengalami kesulitan atau membuat kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Faktor lain yang tidak kalah penting yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah komitmen organisasi. Menurut Wahjharani et al., (2023) Komitmen organisasi aparatur desa sangatlah penting untuk mencapai tujuan organisasi secara maksimal. Seorang aparatur desa yang memiliki komitmen ditandai dengan adanya keyakinan yang kuat terhadap nilai dan tujuan organisasi, memiliki keinginan untuk tetap berada dalam organisasi, dan bersedia meningkatkan kinerjanya untuk mencapai sasaran organisasi. Komitmen organisasi akan mempengaruhi produktivitas karena aparatur desa bersedia untuk bekerja keras. Untuk mencapai kinerja yang optimal diperlukan komitmen yang kuat dari anggota organisasi sehingga pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik.

Terkait dengan komitmen organisasi, jika dikaitkan dengan fenomena yang terjadi, masih adanya keterlambatan penyampaian laporan dana desa kebagian Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) yang diakibatkan aparatur desa, hal ini menunjukkan bahwa sikap etos kerja atau komitmen organisasi yang dimiliki oleh aparatur desa masih sangat kurang. Hal ini bisa dilihat dari adanya data mengenai

beberapa desa yang terlambat dalam menyampaikan laporan Dana Desa pada Kecamatan Pangkalan Susu antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Jumlah Desa Yang Terlambat Menyampaikan Laporan Dana Dana

Tahun	Jumlah
2021	3 Desa
2022	3 Desa
2023	2 Desa

Sumber: Kasi PMD Kecamatan Pangkalan Susu

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 terdapat 3 desa yang terlambat menyampaikan laporan mengenai dana desanya. Dan pada tahun 2023 masih terdapat 2 desa yang terlambat dalam menyampaikan laporan dana desanya pada pihak Kecamatan Pangkalan Susu. Dimana menurut Kasi PMD Kecamatan Pangkalan Susu keterlambatan dalam penyampaian laporan dana desa ini terjadi dikarenakan aparaturnya yang kurang disiplin dalam melaporkan dana desanya. Bahkan menurutnya terdapat beberapa desa yang setiap tahunnya selalu terlambat dalam melaporkan dana desanya.

Dengan adanya hal tersebut tentunya tidak dapat dipungkiri, jika terus terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban mengenai dana desa pada periode berjalan, maka pada periode selanjutnya akan mengalami keterlambatan dalam peluncuran anggaran dana pada desa tersebut sehingga akan mengakibatkan terkendalanya pemerintah desa dalam hal Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan peraturan mengenai desentralisasi otonomi.

Mengenai pengelolaan dana desa harus diimbangi dengan tanggungjawab pelaporan pelaksanaannya melalui pelaporan secara periodik kepada pemerintahan di atasnya yaitu Bupati/Walikota dan Masyarakat, hal ini dapat mempengaruhi kinerja aparatur desa di masa yang akan datang dalam hal Pembangunan, pemberdayaan Masyarakat dan pengelolaan dana desa yaitu satu bulan pada periode berikutnya, laporan semester pertama disampaikan pada bulan juli tahun pertama dan untuk semester akhir paling lambat pada akhir bulan januari pada tahun berikutnya, sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 yang mengatur bagaimana siklus dan batas waktu Pelaporan Pertanggungjawaban realisasi APBDes.

Selain itu, faktor lain yang dibutuhkan adalah Transparansi atau keterbukaan didalam pengelolaan dana desa. Penulis menjadikan Transparansi sebagai variable yang dapat mempengaruhi akuntabilitas setelah Komitmen organisasi. Karena transparansi diperlukan dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah desa wajib mempublikasikan laporan keuangan desa untuk kepentingan akuntabilitas dana desa. Transpatansi merupakan kebebasan Masyarakat untuk mengetahui aktivitas pengelolaan dana desa. Memberikan informasi yang terbuka mengenai penggunaan dana desa sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kecurangan (Nislandi & Munari, 2023).

Transparansi adalah prinsip keterbukaan dengan membagikan informasi keuangan dengan benar dan terbuka kepada Masyarakat dengan penilaian bahwa Masyarakat mempunyai kebebasan untuk memahami secara terbuka dan menyeluruh atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan padanya dan ketaatannya terhadap perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Pasal 25 Nomor

71 Tahun 2010). Prinsip transparansi membentuk kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan Masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam mendapatkan informasi yang akurat dan memadai.

Transparansi ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran dan aktivitas pemerintah terbuka kepada publik. Prinsip atau asas transparansi sendiri adalah sikap membuka diri terhadap hak Masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia desa.

Berkaitan dengan transparansi, fenomena yang terjadi menunjukkan di beberapa pemerintah desa khususnya di Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu masih belum mengoptimalkan sistem Transparansi yang seharusnya diterapkan. Hal ini ditunjukkan karena tidak adanya info grafik APBDes Tahun 2022-2023 yang terpasang di kantor desa dan menimbulkan praduga negatif dari Masyarakat desa setempat sehingga mengakibatkan rendahnya pengetahuan Masyarakat Desa Paya Tampak terhadap program kegiatan desa (Netralnews.com, 2023). Dalam memberikan informasi yang digunakan oleh pemerintah Desa Paya Tampak di Kecamatan Pangkalan Susu, hal tersebut sangat penting diterapkan agar kepercayaan dan partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan dan pemberdayaan desa meningkat seperti pemasangan papan info grafik yang memanfaatkannya secara baik, sedangkan di desa Paya Tampak di Kecamatan Pangkalan Susu mempunyai papan info grafik tetapi hanya sebatas formalitas dan informasi yang disajikan merupakan data lama dan tidak

diperbarui. Seperti pengertian transparansi yang terbuka seharusnya pemerintah desa memberikan informasi mengenai rincian dana desa serta penggunaan dana desa secara rutin setiap penerimaan dana desa.

Dari hasil pemaparan diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan modifikasi terhadap penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurdin & Wijaya, (2023) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Akuntansi Aparat Pengelolaan Dana Desa dan Komitmen Akuntansi Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai)” dengan menambah salah satu variabelnya yaitu Transparansi. Dimana penelitian Nurdin & Wijaya, (2023) menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan penelitian Indraswari, (2021) yang mengatakan bahwa Kompetensi Aparatur Desa tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Nurdin & Wijaya, (2023) menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan penelitian Jannah, (2021) yang menyatakan bahwa Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Dewi, (2020) menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan penelitian Making, (2011) menunjukkan bahwa Transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa-Desa di Kecamatan Pangkalan Susu”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kompetensi kemampuan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur desa di Kecamatan Pangkalan Susu.
2. Masih adanya keterlambatan dalam penyampain laporan pertanggung jawaban mengenai anggaran dana desa yang disebabkan masih rendahnya komitmen organisasi yang dimiliki oleh aparatur desa di Kecamatan Pangkalan Susu.
3. Tidak terdapat papan info grafis APBDes tentang pengeluaran dan pemasukan dana desa di Kecamatan Pangkalan Susu.

1.3 Batasan Masalah

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, tetapi karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis dan guna memudahkan penulis dalam melakukan penelitian yang lebih terarah, maka penulis dalam penelitian ini hanya membahas mengenai Kopetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi Desa dan transparansi. Dari segi responden penelitian, objek penelitian ini hanya menunjukkan kepada seluruh desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Susu.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dijadikan objek penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Pangkalan Susu?
2. Apakah terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Pangkalan Susu?
3. Apakah terdapat pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Pangkalan Susu?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis:

1. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Pangkalan Susu.
2. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Pangkalan Susu.
3. Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Pangkalan Susu.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana dalam menerapkan teori-teori yang telah didapatkan selama memperoleh Pendidikan pada saat kuliah ditengah persoalan yang terjadi di Masyarakat sekitar terutama dalam bidang akuntansi sektor publik.

2. Bagi Desa

Sebagai bahan informasi dan masukan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi desa khususnya mengenai kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi dan Transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

3. Bagi Peneliti Lain

Sebagai referensi yang dapat memberikan wawasan dan masukan serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan proses seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan desa. Pengelolaan diartikan sebagai suatu proses serangkaian tugas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus dimiliki oleh pemangku kepentingan desa khususnya perangkat desa adalah pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa memerlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa lebih bertanggung jawab. Guna meningkatkan efektifitas mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi terhadap pihak-pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku. Aspek ini harus diperhatikan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan dana desa yang baik harus melalui tahapan-tahapan yang ada (Hanum, 2011), siklus pengelolaan dana desa telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 29 meliputi :

1. Perencanaan

Suatu proses tindakan untuk mencapai masa depan yang lebih baik, dengan mempertimbangkan keadaan saat ini dan masa lalu. Inti dari perencanaan adalah meramalkan masa depan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu. Melaksanakan berbagai persiapan berdasarkan data dan informasi yang tersedia saat ini dan memastikan aspek-aspek tersebut dimasukkan dalam rencana Pembangunan khususnya wilayah kecamatan dan desa. Terkait pengelolaan keuangan desa, mengacu pada perencanaan proses penyusunan APBDes.

2. Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 5, sekretaris desa sebagai koordinasi pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan pedoman APBDesa.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa.
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- d. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa dan perubahan penjabaran APBDesa.
- e. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

3. Pertanggungjawaban

Menurut Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa mengacu pada serangkaian proses untuk melaksanakan kegiatan tertentu, yang rangkaian prosesnya meliputi perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi, dan mendukung rencana organisasi yang telah ditentukan.

2.1.1.1 Asas Pengelolaan Dana Desa

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 2 menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, serta dilaksanakan berdasarkan ketertiban dan disiplin anggaran. Melalui prinsip-prinsip tersebut, pemerintah desa diharapkan transparan dalam pengelolaan keuangan desa, bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan serta tertib dalam penggunaan anggaran dengan uraian sebagai berikut :

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan Masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak Masyarakat untuk memperoleh

informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercaya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemeritahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur Masyarakat desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Berdasarkan asas atau prinsip pengelolaan tersebut, maka perlu dijadikan pedoman pengelolaan keuangan desa agar dana tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, ekonomis dan berkeadilan (Sinambela et al., 2018). Secara efektif maksudnya pengelolaan keuangan desa harus mampu mencapai tujuan atau sasaran yang hendak dicapai, secara efisien maksudnya pengelolaan keuangan yang dimaksud harus mampu membuat perbandingan yang terbaik antara masukan dan pengeluarannya. Sedangkan secara ekonomis maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan nilai masukan, Adapun secara berkeadilan maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan dalam Masyarakat. Pengelolaan

keuangan desa mencakup seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggung jawaban keuangan desa (Hafsah & Diana, 2018). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 93 mengenai desa, pengelolaan keuangan desa yaitu meliputi :

a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDesa. Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan APBDesa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenan dan pedoman penyusunannya diatur dengan Peraturan Bupati (perbup) setiap tahun. Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDesa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjukkan Bupati. Kepala desa menugaskan Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran sesuai tugasnya untuk Menyusun Dokumen Penyelenggaraan Anggaran (DPA) setelah peraturan desa tentang APBDesa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa ditetapkan. DPA tersebut terdiri dari :

- 1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa.
- 2) Rencana Kerja Kegiatan Desa.
- 3) Rencana Anggaran Biaya.

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dimaksud dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum yang ditutup setiap akhir bulan.

d. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati melalui camat yang terdiri atas :

- 1) Laporan pelaksanaan APBDesa.
- 2) Laporan realisasi kegiatan.

e. Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

2.1.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban seseorang ataupun organisasi dalam memberikan suatu pertanggung jawaban atas segala aktivitas/kegiatan yang telah diamanatkan padanya kepada pihak yang telah memberikan Amanah dan tentunya berkewenangan dan memiliki hak dalam meminta keterangan atau pertanggungjawaban tersebut.

Menurut (Sari, 2012) akuntabilitas adalah Upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*. *Good Governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawa, serta efisien dan efektif. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi

pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Menurut (Budiarti, 2021) akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintah Desa itu sendiri serta dapat menjamin kesejahteraan Masyarakat. Dalam hal tersebut pemerintahan desa dapat melibatkan kemampuannya dalam melaksanakan Pembangunan desa serta dapat bertanggungjawab untuk mencapai tujuan atau misi yang telah ditetapkan agar sarana pertanggungjawaban dapat dilaksanakan secara berkala, sehingga akuntabilitas pemerintah sebagai penunjang pelaksanaan otonomi desa dapat berjalan dengan baik.

Menurut (Nafidah & Anisa, 2017) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak tau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabliitas merupakan kewajiban dalam menyampaikan pertanggungjawaban mengenai Tindakan, kinerja dan Keputusan seseorang atau organisasi dalam hal ini adalah pemerintah, kepada pihak yang berhak atas pertanggung jawaban tersebut dalam hal ini adalah Masyarakat (Indraswari, 2021). Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk mencapai visi, misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam program yang akan dilaksanakan, memastikan tercapainya tujuan pemerintah tercapai serta ikut dalam melaksanakan tujuan guna menciptakan masyarakat yang dinamis dan sejahtera (Saragih & Alpi, 2023).

Hingga akhirnya tuntutan yang kemudian muncul yaitu perlu dibuatnya laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. Dengan itu terwujudnya penerapan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa merupakan suatu bentuk pelaporan yang mempertanggungjawabkan kinerja lembaga sektor publik. Oleh karena itu, akuntabilitas diharapkan dapat menghasilkan kualitas pemerintahan yang jauh lebih baik, baik terhadap individu maupun program yang dilaksanakan, serta lebih transparan kepada masyarakat.

2.1.2.1 Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Nafidah, (2017) mengemukakan bahwa indikator dalam mengukur akuntabilitas pengelolaan dana desa terdiri atas :

a. Kejujuran dan keterbukaan informasi

Jujur yaitu apa yang dikatakan seseorang yang berintegritas harus sesuai dengan hati nuraninya dan apa yang dikatakannya sesuai dengan kenyataan yang ada. Keterbukaan informasi publik adalah suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

b. Kepatuhan dalam pelaporan

Pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan.

c. Kesesuaian prosedur

Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa.

d. Kecukupan informasi

Kecukupan berarti informasi harus cukup dalam jumlah, yaitu misi harus menyediakan laporan berisi informasi yang diperlukan dalam proses untuk pengambilan keputusan.

e. Ketepatan penyampaian informasi

Ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan faktor penting dalam penyajian laporan keuangan kepada publik sehingga Perusahaan diharapkan untuk tidak menunda penyajian laporan keuangannya agar informasi tersebut tidak kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Hal ini merupakan Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dana akuntabilitas.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa antara lain adalah sebagai berikut :

a. Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi adalah suatu kemampuan atau kecakapan yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas di bidang tertentu, sesuai dengan jabatan yang disandangnya.

b. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan sikap atau perilaku yang ditunjukkan seseorang terhadap organisasi yang menunjukkan kesetiaan untuk mencapai

visi, misi, nilai dan tujuan organisasi. Komitmen organisasi yaitu salah satu faktor yang harus dimiliki oleh seorang dalam organisasi guna mewujudkan akuntabilitas yang baik.

c. **Transparansi**

Transparansi adalah keterbukaan suatu organisasi yang dapat menjamin adanya akses maupun kebebasan setiap individu untuk memperoleh informasi-informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif berkaitan dengan penyelenggaraan organisasi dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan.

2.1.3 Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, sikap dan pengalaman yang dimiliki sumber daya manusia yang bekerja dalam suatu unit organisasi atau Perusahaan, kompetensi sangat dibutuhkan untuk menghadapi perubahan lingkungan yang cepat (Hariani et al., 2022).

Menurut (Zulkifli et al., 2021) dalam mencapai pengelolaan keuangan desa yang akuntabel tentu saja harus didukung dengan sumber daya yang baik pula, karena laporan keuangan yang berkualitas tidak dapat terealisasi tanpa melibatkan sumber daya manusia.

Pemerintah desa hendaknya harus memiliki sumber daya yang kompeten agar pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik. Kompetensi aparat desa bisa didapat melalui latar belakang yang memadai dan mengikuti pelatihan terkhusus pada bidang bagian keuangan.

Menurut (Nainggolan et al., 2023) Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi penyusunan laporan keuangan karena semakin tinggi tingkat

pendidikan seseorang maka akan semakin banyak ilmu dan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh studi yang dapat membantu karyawan selama bekerja.

Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah penting dilakukan serangkaian Upaya diantaranya melalui kegiatan Pendidikan dan pelatihan, serta pengalaman itu sendiri (Aziiz & Prastiti, 2019). Pengalaman di bidang keuangan juga diperlukan aparatur desa untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, kompetensi aparat pemerintah menjadi suatu yang sangat penting agar tata Kelola dana desa berjalan dengan baik.

Aparat yang kompeten akan menghasilkan output yang baik sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan teori sumber daya manusia yang mengemukakan bahwa sumber daya manusia merupakan sumber daya yang harus ditingkatkan kualitas dan kompetensinya untuk menjadi sebuah kekuatan. Sejalan juga dengan teori Stewardship Dimana aparat yang bertugas sebagai memiliki kewajiban untuk melayani sebagai wujud akuntabilitas, sehingga pada saat pengambilan Keputusan dalam penggunaan dana desa akan menghasilkan keputusan yang terbaik guna memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas.

Dari beberapa pendapat diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kompetensi sangat dibutuhkan oleh seorang pegawai atau aparatur desa. Dengan adanya kompetensi dapat meningkatkan kualitas dirinya sehingga dapat menghasilkan kinerja yang maksimal. Seorang pegawai yang tidak memiliki kompetensi akan melakukan pekerjaan lebih lama dan tidak sesuai dengan tujuan.

2.1.3.1 Indikator Kompetensi Aparatur Desa

Menurut Hariani, (2022) menyatakan bahwa indikator dalam mengukur kompetensi aparatur desa terdiri atas :

a. Pengetahuan (*Knowledge*)

Informasi yang dimiliki oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang tertentu.

b. Prilaku (*Attitude*)

Tingkah laku seseorang atau pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh perusahaan.

c. Keahlian (*skill*)

Kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental tertentu. Dapat dilihat dari keterampilan teknik, administratif dan hubungan manusia.

2.1.4 Komitmen Organisasi

Komitmen Organisasi mempunyai kaitan erat dengan akuntabilitas beberapa para ahli menyatakan komitmen organisasi juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas.

Komitmen organisasi pemerintah desa merupakan rasa bertanggungjawab penuh terhadap tugas yang dilakukannya untuk tercapainya tujuan. Menurut (Hadi & Syahrani, 2022) menyebutkan bahwa dengan adanya komitmen organisasi dalam pemerintahan desa maka sumber daya manusia pada organisasi tersebut dapat berjalan secara maksimal dalam menciptakan akuntabilitas yang baik, komitmen organisasi bisa menjadikan ukuran sejauh mana pemerintah desa

memihak organisasinya dan mempertahankan keanggotaannya dalam suatu organisasi. Pemerintah desa yang memiliki komitmen yang kuat di dalam dirinya dapat mendorong aparatur pemerintah desa untuk bekerja keras dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dan mencapai tujuan yang ditentukan oleh organisasi itu sendiri.

Menurut (Latuamury & Tuankotta, 2022) komitmen organisasi merupakan salah satu bentuk dari keberhasilan pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan karena komitmen organisasi yang tinggi mempengaruhi kinerja pemerintah desa. Pada dasarnya komitmen organisasi pemerintah desa merupakan suatu perjanjian yang bersifat mengikat dan dilakukan oleh organisasi pemerintah desa dalam melakukan tugasnya untuk mengelola dana desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan mencegah terjadinya tindak kecurangan atau penyelewangan dalam pengelolaan dana desa.

Jadi dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi adalah kemampuan pada karyawan dalam mengidentifikasi dirinya dengan nilai-nilai, aturan-aturan, tujuan organisasi atau perusahaan, mencakup unsur loyalitas terhadap perusahaan, dan keterlibatan dalam pekerjaan.

2.1.4.1 Indikator Komitmen Organisasi

Menurut (Allen & Mayer, 1993) dalam (Masruhin & Kaukab, 2019) mengemukakan bahwa terdapat tiga komponen dalam komitmen organisasi, antara lain:

a. *Affective Commitment* (Komitmen Afektif)

Terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari organisasi karena adanya ikatan emosional.

b. *Continuance Commitment* (Komitmen Kontinyu)

Perasaan berat meninggalkan organisasi dikarenakan kebutuhan untuk bertahan dengan pertimbangan biaya apabila meninggalkan organisasi dan penghargaan yang berkenaan dengan partisipasinya di organisasi tersebut.

c. *Normative Commitment* (Komitmen Normatif)

Perasaan yang mengharuskan untuk bertahan dalam organisasi dikarenakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap organisasi yang di dasarkan atas pertimbangan norma, nilai dan keyakinan karyawan.

2.1.5 Transparansi

Selain akuntabilitas, dalam pengelolaan juga harus transparan, pengelolaan harus bersifat terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan (Mardiani et al., 2024). Pemendagri Nomor 20 tahun 2018, tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan Masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Organisasi sektor publik harus transparan dalam pengelolaan keuangan publik sebagai bentuk penerapan dari prinsip *good governance*.

Selain itu, prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa tidak kalah pentingnya, transparansi menandakan bahwa dalam pengelolaannya, dana desa menjadi kekuatan Pembangunan yang di dalamnya terdapat keterbukaan baik dari segi anggaran dan penganggarannya maupun dari segi pelaksanaannya (Yanto & Aqfir, 2021).

Menurut (Herman & Ilham, 2018) transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus memberi informasi akurat bagi publik yang membutuhkan, terutama informasi handal yang berkaitan dengan masalah hukum, peraturan, dan hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan, adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang relevan, adanya peraturan yang mengatur kewajiban pemerintah daerah menyediakan informasi kepada masyarakat, serta menumbuhkan budaya di tengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah.

Menurut (Princessa et al., 2022) Transparansi memiliki peran penting untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah dalam melakukan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap terkait yang dikerjakannya, karena kewenangan pemerintah dalam mengambil keputusan memiliki dampak bagi orang banyak. Dengan transparansi dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada Masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui

secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

2.1.5.1 Indikator Transparansi

Berdasarkan teori transparansi yang dikemukakan oleh (Kristianten, 2006) dalam (Princessa et al., 2022), untuk mengukur transparansi dapat melalui beberapa indikator berikut :

a. **Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen**

Adanya penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

b. **Kejelasan dan kelengkapan informasi**

Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan, pelayanan publik dan proses-proses di dalam sektor publik.

c. **Keterbukaan proses**

Adanya keterbukaan proses pengelolaan.

d. **Kerangka regulasi yang menjamin transparansi**

Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan dana desa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk memberikan kejelasan mengenai penelitian yang dilakukan, maka berikut akan disajikan penelitian terdahulu yaitu :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Yasmi Nurdin & Irwan Wijaya, 2023	Pengaruh Kompetensi Akuntansi Aparat Pengelolaan Dana Desa dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh variable kompetensi akuntansi aparat pengelolaan dana desa dan komitmen organisasi pemerintah desa, selebihnya dipengaruhi variable lain(Nurdin & Wijaya, 2023).
Ratih S Panjaitan, Arthur Simanjuntak, Yosephine N Sembiring & Septony Benyamin Siahaan, 2022	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Dana Desa.	Hasil dalam penelitian ini menemukan bahwa pemanfaatan teknoligi informasi, transparansi dan sistem pengendalian internal mempunyai dampak positif berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan kompetensi aparatur, partisipasi Masyarakat dan komitmen organisasi pemerintah desa, tidak punya pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Panjaitan et al., 2022).
Miftahul Jannah, 2021	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana desa, Komitmen Organisasi Pemerintah desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana desa di Kecamatan Kayuagung.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Kompetensi Aparat Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan, untuk variabel Komitmen

		Organisasi Pemerintah Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Secara siltultan variabel independen sama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Jannah, 2021).
Anggiat Situngkir & Benny Irawaty Simarmata, 2022	Pengaruh Kompetensi aparatur Desa, Transparansi dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabillitas Pengelolaan dana desa (Studi empiris pada Desa di Kabupaten Samosir).	Berdasarkan hasil uji secara parsial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa, transparansi, dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kemudian secara simultan, penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa, transparansi, dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan (Situngkir & Simarmata, 2022).
Erliana Shinta Dewi, 2020	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di wilayah Kecamatan Ceper. Sedangkan secara parsial kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan

		teknologi informasi, komitmen organisasi dan transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di wilayah Kecamatan Ceper, tetapi partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di wilayah Kecamatan Ceper (Dewi, 2020).
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang digunakan untuk mempermudah proses penelitian serta menjelaskan maksud dan arah dari penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini hal yang ingin diteliti adalah hubungan antara variabel independent terhadap variabel dependen, yaitu apakah Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi dan Transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa-desa yang ada pada Kecamatan Pangkalan Susu.

2.3.1 Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Untuk meningkatkan akuntabilitas diperluka adanya kompetensi. Terkait pengelolaan dana desa, seorang aparatur desa harus memiliki kemampuan yang baik agar dapat mengelola dan mempertanggung jawabkan dana desa tersebut karena aparatur desa yang berkompeten dalam mengelola keuangan desa dapat meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa tersebut, dan begitu pula

sebaliknya (Pahlawan et al., 2020). Kompetensi dapat mendorong aparat desa memahami proses pengelolaan dana desa secara bertanggung jawab dan transparan sesuai aturan yang berlaku.

Semakin tingginya tingkat kemampuan kompetensi pada aparat desa maka akan meningkat pula akuntabilitas pengelolaan dana desa. aparat desa yg mempunyai kompetensi tinggi akan bisa mengelola dana desa dengan baik. tingginya kompetensi aparat desa berasal dari latar pendidikan yang di tempuh oleh aparat desa. dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparat desa merupakan faktor penting yang dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena keterlibatan sumber daya manusia.

Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang diteliti oleh (Jannah, 2021), (Nurdin & Wijaya, 2023), (Situngkir & Simarmata, 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.3.2 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Komitmen organisasi merupakan elemen yang penting dalam akuntabilitas. Aparatur yang baik akan memiliki komitmen organisasi yang baik dalam mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang dilakukan guna mewujudkan pelayanan yang baik, agar menjadi lebih baik dari sebelumnya (Amaliya & Maryono, 2022).

Semakin tinggi komitmen pemerintah desa, maka pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel. Seseorang yang mempunyai komitmen organisasi yang tinggi akan mencapai tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya (Ando et al., 2024).

Dengan komitmen yang tinggi nantinya akan mempermudah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas di dalam mengelola keuangan desa. Dalam pengelolaan dana desa diperlukannya kesiapan dari aparatur desa yang nantinya dapat mendorong dan melaksanakan program yang sudah ditetapkan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Dewi, 2020) yang menyatakan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

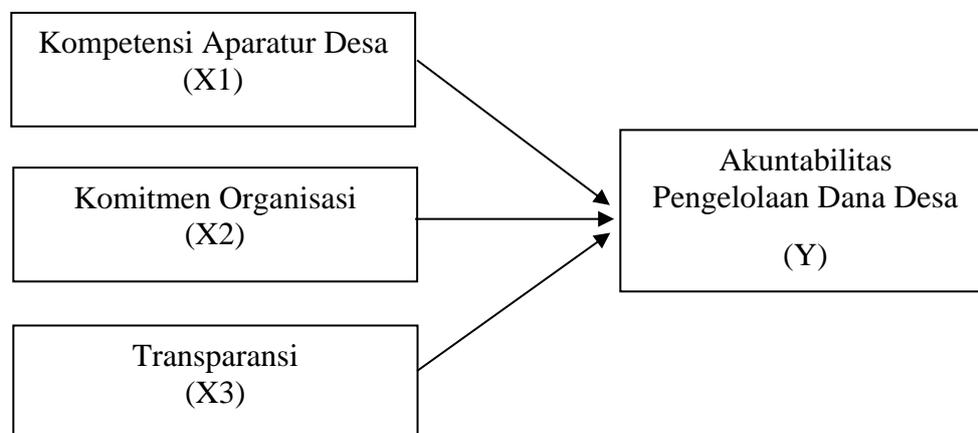
2.3.3 Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Transparansi pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan uang yang tidak ada dirahasiakan dan tidak tersembunyi dari Masyarakat, serta dilakukan sesuai dengan kaidah hukum dan aturan yang berlaku. Dengan adanya transparansi ini, diharapkan keuangan desa dapat dikontrol dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Prinsip transparansi ini penting supaya keuangan desa dapat memenuhi hak-hak Masyarakat dan untuk menghindari konflik di Masyarakat desa.

Transparansi ialah salah satu aspek yang mendasar untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik, perwujudan tata pemerintah yang baik mensyaratkan terdapatnya keterbukaan, keterlibatan, serta kemudahan akses untuk warga terhadap proses penyelenggaraan pemerintah (Budiarti, 2021).

Dari hasil penelitian terdahulu menurut (Panjaitan et al., 2022) Bahwa Transparansi mempunyai dampak positif berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis menggambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban awal atau jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang belum teruji. Tergantung pada proyek yang diteliti, dan perlu dikembangkann untuk beberapa hipotesis yang membahas tentang pertanyaan dalam peneltian. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Terdapat pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Terdapat pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Yaitu jenis penelitian yang bersifat mengukur, berbentuk angka. Metode kuantitatif menurut (Sugiyono, 2020) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan instrument penelitian dengan tujuan menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Dalam pendekatan untuk penelitian ini penulis menggunakan pendekatan asosiatif, yaitu pendekatan yang menghubungkan dua hubungan antara variable atau lebih. Pendekatan ini digunakan dengan tujuan untuk melihat hubungan antara variable independent dan variable dependen. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi dan Transpatansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah Kumpulan prosedur yang digunakan untuk mengukur atau memanipulasinya. Definisi operasional yang baik cukup jelas sehingga peneliti dapat menggunakan prosedur yang sama dan mendapatkan hasil yang sama. Operasional merupakan konsep abstrak yang memudahkan pengukuran variabel. Operasional juga dapat diartikan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian atau pekerjaan. Untuk menghindari kesalahpahaman, definisi operasional dibuat dalam penelitian ini. Variabel yang digunakan ada 4 variabel, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
1.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa merupakan bentuk kewajiban apatur desa terkait dalam memberi pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban mengenai keuangan desa (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014)	<ul style="list-style-type: none"> • Kejujuran dan keterbukaan informasi. • Kepatuhan dalam pelaporan. • Kesesuaian prosedur. • Kecukupan informasi. • Ketepatan penyampaian laporan.
2.	Kompetensi Aparatu Desa (X1)	Kompetensi merupakan suatu karakter seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability) dalam melakukan pekerjaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan • Kemampuan untuk meningkatkan kemampuan. • Keahlian teknis. • Kemampuan mencari Solusi • inisiatif dalam bekerja • keramahan dan kesopanan.
3.	Komitmen Organisasi (X2)	Komitmen organisasi adalah kondisi Dimana seorang pegawai memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen afektif. • Komitmen kontinyu. • Komitmen normative.
4.	Transparansi (X3)	Transpatansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Kesiediaan dan aksesibilitas dokumen. • Kejelasan dan kelengkapan informasi. • Keterbukaan proses. • Kerangka regulasi yang menjamin transpatansi.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada seluruh desa yang berada di Kecamatan Pangkalan Susu. Berikut adalah daftar nama-nama desa yang terdapat pada Kecamatan Pangkalan Susu :

Tabel 3. 2 Daftar Nama Desa di Kecamatan Pangkalan Susu

No	Nama Desa
1.	Desa Alur Cempedak
2.	Desa Sei Siur
3.	Desa Tanjung Pasir
4.	Desa Paya Tampak
5.	Desa Pintu Air
6.	Desa Sei Meran
7.	Desa Pulau Sembilan
8.	Desa Pulau Kampai
9.	Desa Pangkalan Siata

Sumber: Kasi PMD Kecamatan Pangkalan Susu

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan januari 2024 sampai dengan selesai. Untuk secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Rencana Penyusunan Proposal

No	Jenis Kegiatan	Feb 2024	Mar 2024	Apr 2024	Mei 2024	Jun 2024	Jul 2024	Agst 2024	Sep 2024
1.	Pra Riset								
2.	Pengajuan Judul								
3.	Penulisan Proposal								
4.	Seminar Proposal								
5.	Riset								
6.	Penulisan Skripsi								
7.	Meja Hijau								

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut (Adnyana, 2021) mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang ada dalam penelitian. Wilayah ini meliputi tentang objek atau subjek yang bisa ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur pada seluruh kantor desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Susu.

3.4.2 Sampel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel jenuh. Menurut (Adnyana, 2021) sampling jenuh merupakan Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 10 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Dengan istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus, Dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.

Alasan penelitian ini menggunakan Teknik sampel jenuh dikarenakan jumlah populasi kecil, maka sampel dalam penelitian ini menggunakan seluruh jumlah populasi untuk digunakan sebagai responden sebanyak 36 orang dan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan kaur atau kasi umum.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer atau data yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung kepada aparatur desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Susu. Dengan cara

menyebarkan kuesioner yang telah berisi pertanyaan dan nantinya setiap jawaban dari aparaturnya akan diukur dengan Skala Likert.

Menurut (Adnyana, 2021) Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat serta persepsi seseorang ataupun sekelompok orang mengenai fenomena sosial. Penulis menggunakan penilaian kuesioner untuk setiap jawaban dengan bobot dari kategori sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Skor Penilaian Pada Kuesioner

Bobot	Kategori
5	Sangat Setuju (SS)
4	Setuju (S)
3	Netral (N)
2	Tidak Setuju (TS)
1	Sangat Tidak Setuju (STS)

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini Teknik analisis data yang digunakan adalah *Partial Least Squares (PLS) – Structural Equation Modelling (SEM)* dengan menggunakan *software WarpPLS* versi 8.0. *Partial Least Squares (PLS)* merupakan Teknik statistik multivarian yang digunakan untuk membandingkan antara beberapa variabel dependen dengan beberapa variabel independen. PLS biasa dipakai dalam mengatasi masalah spesifik data, seperti sampel berukuran kecil, data hilang dan Ketika analisis regresi berganda terjadi multikolinearitas (F. M. Sari et al., 2022). PLS dipergunakan dalam pengujian hubungan variabel independen dengan variabel dependen dan menjelaskan hubungan secara teoritis antar variabel terkait.

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan bidang ilmu statistika yang mempelajari cara-cara pengumpulan, penyusunan, dan penyajian information suatu penelitian. Statistik deskriptif adalah bagian dari ilmu statistik yang meringkas, menyajikan dan mendeskripsikan information dalam bentuk yang mudah dibaca sehingga memberikan informasi tersebut lebih lengkap.

3.6.2 Permodelan Partial Least Square (PLS)

Menurut penjelasan Ghozali & Latan (2018) tentang modal SEM-PLS, model yang digunakan dalam penyelidikan ini melewati langkah-langkah berikut:

1. Konseptualisasi Model.

Langkah pertama pada analisis PLS-SEM yaitu konseptualisasi model. Dalam tahap ini mendefinisikan secara konseptual konstruk yang akan dipelajari apakah dalam bentuk variabel manifest atau variabel laten. Indikator yang digunakan yaitu formatif ataupun reflektif. Variabel manifest menjadi variabel yang digunakan pada penelitian ini Dimana variabel ini dapat diukur langsung besaran kuantitatifnya. Indikator variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah indikator formatif. Pada variabel formatif perubahan dalam satu atau lebih indikator menyebabkan perubahan dalam variabel.

2. Menentukan Metode Analisis Algorithm.

Terdapat dua peraturan algorithm dalam PLS dengan program WarpPLS yaitu *outer model* dan *inner model*. Konstruk penelitian formatif ataupun reflektif menjadi pertimbangan dalam pilihan *algorithm (outer model)*. Outer model yang digunakan yaitu PLS Regression, selain menjadi *default* yang terdapat

diaplikasi WarpPLS, PLS Regression juga bisa dipergunakan pada konstruk formatif ataupun reflektif dan PLS Regression mampus meng-*handel* data yang memiliki permasalahan kolinieritas. Setelah melakukan pengaturan pada *outer model*, Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengaturan pada *inner model*.

3. Menentukan Metode Resampling.

Resampling merupakan prosedur penyampelan ulang karena nilai signifikan dari estimasi model PLS tidak diketahui. Terdapat dua metode *sampling* pada umumnya, yaitu *bootstrapping* dan *jackknifing*. *Jackknifing* akan stabil ketika *original sampling* berada dibawah 100, namun jika sampel lebih dari 100 lebih baik menggunakan *bootstrapping*.

4. Menggambar Diagram Jalur

Diagram jalur disusun berdasarkan model penelitian empiris yaitu terkait hubungan kausalitas antara mekanisme monitoring dengan tinjauan dampak Kompetensi Aparatur Desa (X1), Komitmen Organisasi (X2), Transparansi (X3) terhadap akuntabilitas Pengelolaan dana Desa (Y).

5. Evaluasi Model

Evaluasi model dalam PLS-SEM terdapat dua tahapan yang harus dilewati yaitu evaluasi model pengukuran dan evaluasi model struktural. Model pengukuran (*outer model*) uji terdiri dari validitas dan reabilitas, model struktural (*inner model*) terdiri dari uji hipotesis. Namun, model pengukuran tidak diperlukan pada penelitian ini karena semua variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel manifest sehingga uji validitas dan reabilitas tidaklah diperlukan. Sehingga evaluasi model bisa langsung dilakukan pada tahap evaluasi model struktural.

3.6.2.1 Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Model pengukuran atau outer model (*Outer Model*) adalah sebuah model yang menghubungkan antara variabel laten dengan variabel manifes. Variabel laten merupakan faktor yang tidak dapat diamati secara langsung dan membutuhkan variabel manifes yang ditetapkan sebagai indikator untuk menguji. Sedangkan variabel manifes adalah variabel atau faktor yang yang dapat diamati secara langsung. Outer model digunakan sebagai penentu spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikatornya untuk menilai outer model digunakan SEM-PLS meliputi *Convergent Validity*, *Composite Reliability*, dan *Discriminan Validity*.

A. *Convergent Validity*

Convergent Validity menunjukkan suatu tingkatan sebuah pengukuran atau indikator yang berkorelasi positif dengan pengukur atau indikator alternatif untuk konstruk yang sama. Uji validitas *Convergent* dilakukan dengan melihat nilai *loading Faktor* dan dibandingkan dengan *Rule Of Thumb* ($>0,60$), kemudian melihat nilai *Average Variance Extracted (AVE)* dan di bandingkan dengan *Rule Of Thumb* ($>0,50$).

B. *Composite Reability*

Composite Reability merupakan sebuah alat untuk mengukur konstruk dengan indikator reflektif yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reability*. *Composite Reability* lebih baik dalam mengukur *internal consistency* karena tidak mengasumsikan titik awal yang sama untuk setiap indikator. *Composite Reability* sama dengan *Cronbach's Alpha* dengan nilai batas ($\geq 0,7$) yang artinya dapat diterima dan nilai ($\geq 0,8$) sangat memuaskan.

C. *Discriminant Validity*

Validitas diskriminan menunjukkan tingkatan seberapa besar sebuah variabel laten atau konstruk benar-benar berbeda dengan konstruk lain sebagaimana yang ditunjukkan oleh hasil penelitian empiris. Untuk menilai validitas diskriminan menggunakan dua pendekatan yaitu *Cross Loading* dan *Fornell-Larcker Criterion*. *Cross Loading* merupakan pendekatan yang pertama kali digunakan dalam menilai validitas diskriminan indikator-indikator. Cara menguji validitas diskriminan adalah dengan indikator reflektif dengan melihat nilai *Cross Loading*. Nilai ini untuk setiap variabelnya harus $>0,70$. *Fornell-Larcker Criterion* memperbandingkan akar Average Variance Extructed (AVE) dengan korelasi antar variabel laten atau konstruk. Biasanya model memiliki validitas diskriminan yang cukup, jika akar AVE untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya dalam model.

Tabel 3. 5 Rule of Thumb Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

No	Kriteria	Parameter	Rule of Thumb
1.	<i>Indikator Reability</i>	<i>Loading Factor</i>	<ul style="list-style-type: none"> • > 0.70 untuk <i>confirmatory research</i>. • $0.60 - 0.70$ masih dapat diterima untuk <i>exploratory reserch</i>.
2.	<i>Internal Cosistency Reability</i>	<i>Composite Reliability</i>	<ul style="list-style-type: none"> • > 0.70 untuk <i>confirmatory reserch</i>. • $0.60 - 0.70$ masih dapat diterima untuk <i>exploratory reserch</i>.
3.	<i>Convergent Validity</i>	<i>Average variance Extracted</i>	> 0.50 untuk <i>confirmatory reserch</i> dan <i>exploratory reserch</i> .
4.	<i>Discriminant Validity</i>	Akar kuadrat AVE dan korelasi antar konstruk laten	Akar kuadrat AVE $>$ korelasi antar konstruk laten.

Sumber: Ghozali & Latan (2018)

3.6.2.2 Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Langkah selanjutnya setelah melakukan evaluasi model pengukuran (*outer model*), dengan kriteria *convergent validity*, *discriminant validity* dan *composite reliability* dan hasilnya telah memenuhi syarat adalah melakukan evaluasi struktural (*inner model*). *Inner model* menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk laten dengan konstruk laten lainnya. Evaluasi model struktural digunakan sebagai penentu spesifikasi hubungan antara variabel laten satu dengan variabel laten lainnya.

Evaluasi ini meliputi uji kecocokan model (*model fit*), *path coefficient*, dan R². Uji kecocokan model dilakukan sebelum menguji signifikansi *path coefficient* dan R². Uji model fit ini digunakan untuk mengetahui suatu model memiliki kecocokan dengan data. Pada uji kecocokan model terdapat 3 indeks pengujian, yaitu *average path coefficient* (APC), *average R—squared* (ARS) dan *average varians factor* (AVIF). APC dan ARS diterima dengan syarat p – value < 0.05 dan AVIF lebih kecil dari 5. Selanjutnya hasil *path coefficient* dan R² dapat dilihat pada *direct effect*, hasil dari pengolahan data. *Path coefficient* digunakan untuk mengetahui seberapa besar nilai koefisien jalur.

3.6.2.3 Uji Hipotesis

Suatu hipotesis dapat diterima atau harus ditolak secara statistik dapat dihitung melalui tingkat signifikansinya. Tingkat signifikansi yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebesar 5%. Apabila tingkat signifikansi yang dipilih sebesar 5% maka tingkat signifikansi atau tingkat kepercayaan 0,05 untuk menolak suatu hipotesis. Berikut ini yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yaitu: $pvalue \leq 0,05$ maka hipotesis diterima. $P-value \geq 0,05$, maka hipotesis ditolak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

Objek dalam penelitian ini adalah aparatur desa yang memiliki wewenang dalam menjalankan pengelolaan dana yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan kaur keuangan, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang ada pada Kecamatan Pangkalan Susu dengan jumlah desa sebanyak 9 Desa. Penelitian ini mempunyai tujuan guna untuk melihat pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Pangkalan Susu. Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer. Dimana data yang penulis peroleh berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membagikan kuesioner secara langsung kepada para responden.

4.1.1 Deskripsi Identitas Responden

Penelitian ini dilakukan terhadap aparatur desa yang berada di desa-desa pada Kecamatan Pangkalan Susu. Dengan jumlah responden sebanyak 36 orang. Dalam penelitian ini penulis mengelola data angket dalam bentuk data yang terdiri dari 10 pernyataan Kompetensi Aparatur Desa (X1), 7 pernyataan Komitmen Organisasi (X2), 6 pernyataan Transparansi (X3) dan 8 pernyataan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 36 responden dalam penelitian ini menunjukkan identitas responden yang terdiri dari usia, jenis kelamin, Pendidikan dan masa kerja.

a. Usia Responden

Tabel 4. 1 Usia Responden

Usia	Jumal
< 30 Tahun	11 Orang
30-40 tahun	8 Orang
> 40 Tahun	17 Orang
Total	36 Orang

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa terdapat responden dengan usia < 30 tahun dengan jumlah 11 orang, usia 30-40 tahun dengan jumlah 8 orang dan usia > 40 tahun dengan jumlah 17 orang.

b. Jenis Kelamin Responden

Tabel 4. 2 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	18 Orang
Perempuan	18 Orang
Total	36 Orang

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa terdapat 18 responden dengan jenis kelamin laki-laki dan terdapat 18 responden dengan jenis kelamin Perempuan.

c. Pendidikan Responden

Tabel 4. 3 Pendidikan Responden

Pendidikan	Jumlah
SMA	27 Orang
D3	2 Orang
S1	7 Orang
Total	36 Orang

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui mayoritas responden dalam penelitian ini yaitu berpendidikan SMA sebanyak 27 orang, responden yang berpendidikan Diploma (D3) sebanyak 2 orang, responden yang berpendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 7 orang.

d. Masa Kerja Responden

Tabel 4. 4 Masa Kerja Responden

Masa Kerja	Jumlah
< 2 Tahun	1 Orang
2-5 Tahun	18 Orang
> 5 Tahun	17 Orang
Total	36 Orang

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 responden dengan masa kerja < 2 tahun, terdapat 18 responden dengan masa kerja 2-5 tahun dan terdapat 17 responden dengan masa kerja > 5 tahun.

4.1.2 Distribusi Tanggapan Responden

Berikut akan dijelaskan hasil penelitian dari data kuesioner yang sudah dibagikan kepada responden, namun sebelum dilakukan pengujian hipotesis penulis akan menjabarkan terlebih dahulu persentase dari jawaban responden untuk setiap kuesioner yang telah dibagikan, penulis telah menetapkan bahwa jawaban dari masing-masing reponden akan menggunakan skala likert dengan skor 1 sampai dengan 5.

Tabel 4. 5 Kriteria Jawaban Responden

Kriteria	Bobot	Keterangan
SS	5	Sangat Setuju
S	4	Setuju
N	3	Netral
TS	2	Tidak Setuju
STS	1	Sangat Tidak Setuju

Tabel 4. 6 Skor Angket Variabel Kompetensi Aparatur Desa

	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Mean
X1.1	17	14	4	0	1	4.28
X1.2	22	10	2	1	1	4.42
X1.3	11	13	11	0	1	3.92
X1.4	9	11	13	2	1	3.69
X1.5	11	13	11	0	1	3.92
X1.6	8	14	11	3	0	3.75
X1.7	9	17	10	0	0	3.97
X1.8	8	20	7	1	0	3.97
X1.9	8	20	8	0	0	4.00
X1.10	10	17	7	2	0	3.97
Mean						3.99

Sumber: Data diolah, 2024

Pada tabel di atas menunjukkan item X1.2 merupakan item yang paling dominan pada variabel kompetensi aparatur desa karena memiliki nilai mean tertinggi yaitu sebesar 4,42. Pada item X1.2, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 22 responden dan paling sedikit menjawab tidak setuju sebanyak 1 responden.

Tabel 4. 7 Skor Angket Variabel Komitmen Organisasi

	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Mean
X2.1	0	13	16	7	0	3.17
X2.2	1	13	15	7	0	3.22
X2.3	0	8	20	8	0	3.00
X2.4	4	10	15	7	0	3.31
X2.5	0	9	18	9	0	3.00
X2.6	0	6	21	9	0	2.92
X2.7	0	6	19	11	0	2.86
Mean						3.07

Sumber: Data diolah, 2024

Pada tabel di atas menunjukkan item X2.4 merupakan item yang paling dominan pada variabel kompetensi komitmen organisasi karena memiliki nilai mean tertinggi yaitu sebesar 3,31. Pada item X2.4, mayoritas responden menjawab netral sebanyak 15 responden dan paling sedikit menjawab sangat setuju sebanyak 4 responden.

Tabel 4. 8 Skor Angket Variabel Transparansi

	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Mean
X3.1	10	21	5	0	0	4.14
X3.2	9	20	7	0	0	4.06
X3.3	11	17	8	0	0	4.08
X3.4	11	11	14	0	0	3.92
X3.5	12	18	6	0	0	4.17
X3.6	10	20	6	0	0	4.11
Mean						4.08

Sumber: Data diolah, 2024

Pada tabel di atas menunjukkan item X3.5 merupakan item yang paling dominan pada variabel transparansi karena memiliki nilai mean tertinggi yaitu sebesar 4,17. Pada item X3.5, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 18 responden dan paling sedikit menjawab netral sebanyak 6 responden.

Tabel 4. 9 Skor Angket Variabel Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa

	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Mean
Y.1	11	18	7	0	0	4.11
Y.2	11	19	6	0	0	4.14
Y.3	11	17	8	0	0	4.08
Y.4	10	20	6	0	0	4.11
Y.5	10	19	7	0	0	4.08
Y.6	8	19	9	0	0	3.97
Y.7	12	20	4	0	0	4.22
Y.8	11	14	10	0	1	3.94
Mean						4.08

Sumber: Data diolah, 2024

Pada tabel 4 di atas menunjukkan item Y.7 merupakan item yang paling dominan pada variabel transparansi karena memiliki nilai mean tertinggi yaitu sebesar 4,22. Pada item Y.7, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 20 responden dan paling sedikit menjawab netral sebanyak 4 responden.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah kegiatan yang mengumpulkan, menyusun, merangkum dan menyajikan data dengan tujuan agar lebih bermakna serta mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna data. Statistik deskriptif hanya sebatas memberikan gambaran umum mengenai objek yang akan diteliti. Statistik deskriptif menentukan nilai statistik dan membuat diagram atau gambar tentang suatu hal dimana data tersebut disajikan dalam format yang mudah dipahami atau dibaca. Analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 10 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Standart Deviasi
Kompetensi aparatur Desa (X1)	36	25.00	50.00	39.8889	6.20036
Komitmen Organisasi (X2)	36	14.00	28.00	21.4722	4.31268
Transparansi (X3)	36	18.00	30.00	24.4722	3.43500
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	36	24.00	40.00	32.6667	4.77493

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif yang disajikan diatas, maka diperoleh sajian data penelitian sebagai berikut:

Tabel menunjukkan sebaran data untuk variabel Kompetensi Aparatur Desa menunjukkan nilai minimum 25.00 dan nilai maksimum 50.00 dengan rata-rata 39.8889, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden cukup mengerti dan paham tentang adanya kompetensi aparatur desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa, hasil tersebut relatif tinggi dengan melihat dekatnya nilai rata-rata dan maksimum. Sementara nilai standart deviasi 6.20036 (dibawah rata-rata), artinya tingkat variansi data yang rendah (homogen) dengan melihat jauhnya nilai rata-rata dan standart deviasi, sehingga penyebaran nilainya merata.

Pada variabel Komitmen Organisasi, sebaran data menunjukkan nilai minimum 14.00 dan nilai maksimum 28.00 dengan rata-rata 21.4722, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden cukup mengerti dan paham tentang adanya komitmen organisasi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa, hasil tersebut relatif tinggi dengan melihat dekatnya nilai rata-rata dan maksimum. Sementara nilai standar deviasi 4.31268 (dibawah rata-rata), artinya tingkat varians data yang rendah (homogen) dengan melihat jauhnya nilai rata-rata dan standart deviasi, sehingga penyebaran nilainya merata.

Pada variabel Transparansi sebaran data menunjukkan nilai minimum sebesar 18.00 dan nilai maksimum 30.00 dengan rata-rata 24,4722, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata resonden cukup mengerti dan paham tentang adanya transparansi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa, hasil tersebut relatif tinggi dengan melihat dekatnya nilai rata-rata dan maksimum. Sementara nilai standar deviasi 3.43500 (dibawah rata-rata), artinya Tingkat varian data yang rendah (homogen) dengan melihat jauhnya nilai rata-rata dan standart deviasi, sehingga penyebaran nilainya merata.

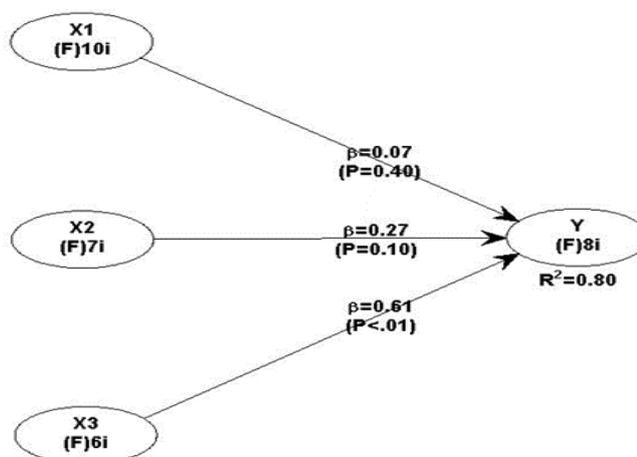
Pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, sebaran data menunjukkan nilai minimum 24.00 dan nilai maksimum 40.00 dengan rata-rata 32.6667, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden menyatakan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam instansinya adalah baik, hasil tersebut relatif tinggi dengan melihat nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimum. Sementara nilai standar deviasi 4.77493 (dibawah rata-rata), artinya Tingkat variasi data yang rendah (homogen) dengan melihat jauhnya nilai rata-rata dan standart deviasi, sehingga penyebaran nilainya merata.

4.2.2 Model Pengukuran/*Measurement (Outer Model)*

Model pengukuran atau outer model adalah model yang digunakan untuk menentukan antara hubungan variabel laten dengan indikatornya. Model pengukuran (*outer model*) ditentukan dengan menggunakan uji *Convergent validity*, *Composite Reliability*, *Discriminan Validity*.

4.2.2.1 Convergent Validity

Uji validitas digunakan untuk memastikan bahwa item-item setiap variabel akan lebih mudah di mengerti dalam melakukan uji validitas sesuai dengan kriteria yang sudah di tetapkan. Suatu indikator dinyatakan valid jika pengukuran *Outer Loading* di atas 0,60 sehingga bila ada Outer Loading dibawah 0,60 maka akan di drop dari model (Ghozali, 2018). Pengujian validitas untuk indikator reflektif menggunakan korelasi antara skor item dengan skor konstruknya. Pengukuran dengan indikator reflektif menunjukkan adanya perubahan pada suatu indikator dalam suatu konstruk jika indikator lain pada konstruk yang sama berubah (atau dikeluarkan dari model).



Gambar 4. 1 Outer Model

Tabel 4. 11 Hasil Nilai Outer Loading Awal

variabel	indikator	Outer Loading	Keterangan
Kompetensi Aparatur Desa (X1)	X1.1	0,103	Tidak Valid
	X1.2	0,176	Tidak Valid
	X1.3	0,777	Valid
	X1.4	0,761	Valid
	X1.5	0,720	Valid
	X1.6	0,559	Tidak Valid
	X1.7	0,601	Valid
	X1.8	0,642	Valid
	X1.9	0,386	Tidak Valid
	X1.10	0,762	Valid
Komitmen Organisasi (X2)	X2.1	0,654	Valid
	X2.2	0,634	Valid
	X2.3	0,588	Tidak Valid
	X2.4	0,851	Valid
	X2.5	0,748	Valid
	X2.6	0,853	Valid
	X2.7	0,796	Valid
Transparansi (X3)	X3.1	0,782	Valid
	X3.2	0,392	Tidak Valid
	X3.3	0,771	Valid
	X3.4	0,834	Valid
	X3.5	0,504	Tidak Valid
	X3.6	0,852	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Y.1	0,572	Tidak Valid
	Y.2	0,719	Valid
	Y.3	0,807	Valid
	Y.4	-0,288	Tidak Valid
	Y.5	0,187	Tidak Valid
	Y.6	0,571	Tidak Valid
	Y.7	0,890	Valid
	Y.8	0,667	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data WarpPLS, 2024

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui Sebagian besar item variabel telah valid. Hal tersebut dikarenakan nilai *Outer Loading* di atas 0,60 (Ghozali, 2018). Namun masih terdapat beberapa item yang memiliki nilai *Outer Loading* di bawah 0,60, maka perlu dilakukan eliminasi item untuk mendapatkan nilai yang diharapkan. Berikut hasil pengujian *convergent validity* yang telah melakukan eliminasi pada indikator yang tidak valid.

Tabel 4. 12 Hasil Nilai Outer Loading Setelah Eliminasi

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
Kompetensi Aparatur Desa (X1)	X1.3	0,870	Valid
	X1.4	0,661	Valid
	X1.5	0,731	Valid
	X1.7	0,635	Valid
	X1.8	0,753	Valid
	X1.10	0,743	Valid
Komitmen Organisasi (X2)	X2.1	0,666	Valid
	X2.2	0,639	Valid
	X2.4	0,843	Valid
	X2.5	0,777	Valid
	X2.6	0,869	Valid
	X2.7	0,788	Valid
Transparansi (X3)	X3.1	0,779	Valid
	X3.3	0,786	Valid
	X3.4	0,859	Valid
	X3.6	0,905	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Y.2	0,781	Valid
	Y.3	0,917	Valid
	Y.7	0,845	Valid
	Y.8	0,745	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data warpPLS, 2024

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, setelah dilakukan eliminasi hasil *Convergent Validity* menunjukkan bahwa semua indikator memiliki nilai *Outer Loading* di atas 0,60 (Ghozali, 2018), yang artinya semua indikator pada Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dinyatakan valid untuk mengukur setiap indikatornya. Selain nilai *Outer Loading*, untuk menganalisis validitas data penelitian dapat menggunakan nilai *Average Variance Extracted* (AVE). Berikut adalah hasil uji validitas menggunakan nilai AVE.

Tabel 4. 13 Hasil Nilai *Average Varian Extracted* (AVE)

Variabel	Average Varian Extracted	Keterangan
Kompetensi Aparatur Desa (X1)	0,736	Valid
Komitmen Organisasi (X2)	0,768	Valid
Transparansi (X3)	0,834	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,825	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data WarpPLS, 2024

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, diketahui bahwa seluruh variabel penelitian valid. Hal tersebut dikarenakan nilai AVE berada di atas ketentuan sebesar 0,50 (Ghozali, 2018).

4.2.2.2 Composite Reability

Composite reliability menguji nilai-nilai reliabilitas indikator-indikator pada suatu variabel. Suatu variabel akan dikatakan memenuhi *composite reliability* apabila memiliki nilai *composite reliability* >0.70. Nilai masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4. 14 Hasil Nilai Composite Reability

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reability	Status
Kompetensi Aparatur Desa (X1)	0,827	0,875	Reliabel
Komitmen Organisasi (X2)	0,858	0,895	Reliabel
Transparansi (X3)	0,852	0,901	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,841	0,894	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan Data WarpPLS, 2024

Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukkan seluruh variabel mampu menghasilkan nilai *composite reliability* >0.70 dengan kata lain nilai *composite reliability* telah memenuhi *composite reliability* dan juga dapat diartikan bahwa semua indikator dalam penelitian yang digunakan dalam mengukur Kompetensi aparatur Desa (X1), Komitmen Organissai (X2), dan Transparansi (X3), Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) telah memenuhi syarat reliabel.

4.2.2.3 Discriminant Validity

Vadilitas diskriminan dilakukan dengan membandingkan korelasi antara variabel dengan AVE pada suatu variabel. Model pengukuran *discriminant validity* yang baik jika AVE pada variabel itu sendiri lebih besar daripada korelasi antar variabel lainnya (Ghozali, 2018). Keseluruhan nilai AVE dan korelasi variabel laten dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4. 15 Hasil Nilai AVE dan Korelasi Variabel Laten

	Kompetensi Aparatur Desa (X1)	Komitmen Organisasi (X2)	Transparansi (X3)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)
Kompetensi Aparatur Desa (X1)	0,736			
Komitmen Organisasi (X2)	0,733	0,768		
Transparansi (X3)	0,727	0,753	0,834	
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,735	0,656	0,797	0,825

Sumber: Hasil Pengolahan Data WarpPLS, 2024

Pada Tabel 4.9 diatas, dapat dilihat nilai korelasi variabel tersebut lebih besar dibandingkan korelasi variabel lainnya, maka dari itu diperoleh kesimpulan bahwa seluruh variable telah valid untuk digunakan. Selain uji *discriminant validity* juga dapat diuji berdasarkan nilai *Cross Loading*. Suatu indikator dinyatakan memenuhi *discriminant validity* apabila nilai *cross loading* dimensi pada variabelnya adalah yang terbesar dibandingkan pada variabel lainnya (Ghozali, 2018). Berikut adalah hasil nilai cross loading.

Tabel 4. 16 Hasil Nilai *Cross Loading*

	Kompetensi Aparatur Desa (X1)	Komitmen Organisasi (X2)	Transparansi (X3)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)
X1.3	0,870	-0,059	0,076	0,304
X1.4	0,661	0,318	0,446	-0,322
X1.5	0,731	-0,103	0,697	0,226
X1.7	0,635	-0,040	-0,607	-0,250
X1.8	0,753	-0,052	-0,949	0,134
X1.10	0,743	-0,025	0,016	-0,213
X2.1	0,400	0,666	0,012	-0,172
X2.2	0,505	0,639	0,631	-0,911
X2.4	-0,018	0,843	-0,297	0,476
X2.5	-0,756	0,777	0,629	-0,105
X2.6	0,091	0,869	-0,115	-0,182
X2.7	0,082	0,788	-0,778	0,679
X3.1	0,324	0,056	0,779	0,314
X3.3	-0,067	-0,311	0,786	-0,228
X3.4	-0,658	0,250	0,859	0,000
X3.6	0,403	-0,015	0,905	-0,072
Y.2	0,459	-0,377	-0,265	0,781
Y.3	0,049	0,174	-0,323	0,917
Y.7	-0,294	0,141	0,656	0,845
Y.8	-0,208	0,021	-0,182	0,745

Sumber: Hasil Pengolahan Data WarpPLS, 2024

Dari tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai korelasi untuk setiap indikator dari masing-masing variabel laten memiliki nilai korelasi yang paling besar dibanding nilai korelasi jika dihubungkan dengan indikator variabel laten lainnya. Hal ini berarti bahwa setiap indikator variabel laten memiliki *discriminant validity* yang baik dimana indikator variabel laten memiliki pengukur yang berkorelasi tinggi dengan konstruk lainnya.

4.2.3 Model Struktural/*Structural Model (Inner Model)*

Setelah model yang diestimasi memenuhi kriteria *Outer Model*, berikutnya peneliti melakukan pengujian Model Struktural (*Inner Model*), pengujian *inner model* atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.

4.2.3.1 Hasil uji R Square

Dalam menilai *inner model* dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen. R-Square adalah indikator yang mengukur seberapa besar variasi nilai variabel yang dipengaruhi (endogen) dapat dijelaskan oleh variabel yang memengaruhinya (eksogen). Pengukuran ini berguna untuk mengevaluasi kualitas model, baik itu baik atau buruk.

Tabel 4. 17 Hasil Uji R Square

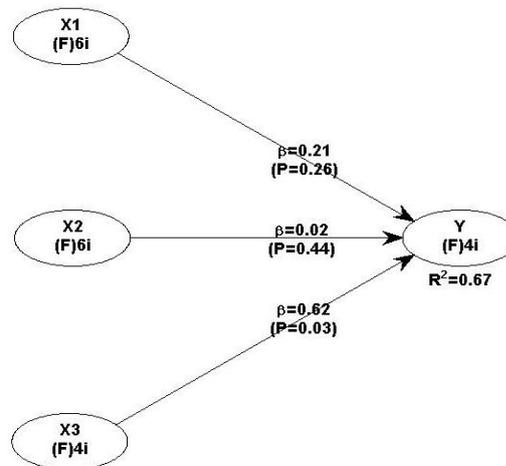
	R Square	R Square Adjusted
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,666	0,635

Sumber: Hasil Pengolahan Data WarpPLS, 2024

Berdasarkan Tabel 4.11 diatas, terlihat bahwa nilai R-Square untuk konstruk akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,666. Berarti model tersebut mengindikasikan bahwa model structural pada penelitian ini termasuk dalam kategori “sedang”. Hal ini juga berarti variabilitas akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh variabel dalam model sebesar 66,6% dan sisanya sebesar 33,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

4.2.4 Hasil Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini menggunakan metode partial least square (PLS). Penilaian dalam PLS meliputi penilaian inner model atau model structural. Analisa model struktural dilakukan dengan melihat hasil pada parameter koefisien dan tingkat signifikansinya. Untuk melihat hasil signifikansi dari koefisien parameter dapat dihitung dari dimensi variabel yang telah valid. Peneliti ingin mengetahui terdapat pengaruh positif atau negatif dan signifikan atau tidak signifikan berdasarkan perhitungan P Values yang harus dibawah 0,05 dan t statistik lebih besar sama dengan 1,960 (Ghozali, 2018). Jika t statistik lebih besar daripada t tabel (1,960) maka kedua konstruk tersebut dinyatakan signifikan dan begitu pula sebaliknya.



Gambar 4. 2 Inner Model

Berdasarkan gambar 4.2 diatas, selanjutnya disajikan pada Tabel di bawah ini untuk mengetahui nilai *path coefficient* dan nilai signifikansinya.

Tabel 4. 18 Hasil Uji Hipotesis

	Original sample (O)	T statistics (O/STDEV)	P values
Kompetensi Aparatur Desa (X1) ->Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,206	1,151	0,261
Komitmen Organisasi (X2) ->Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,024	1,016	0,443
Transparansi (X3) ->Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,618	2,499	0,035

Sumber: Hasil Pengolahan Data WarpPLS, 2024

Berdasarkan Tabel 4.12 diatas, terlihat bahwa Hipotesis Penelitian dapat dijawab sebagai berikut:

4.2.4.1 Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hubungan variable Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,206 dengan nilai p-value sebesar 0,261 nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dengan T-Statistik 1,151 lebih kecil dari 1,960. Hasil ini berarti bahwa Kompetensi aparatur Desa memiliki hubungan yang positif tetapi tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, Hipotesis H1 dalam penelitian ini dinyatakan ditolak.

Berdasarkan hasil penelitian, hal ini sejalan dengan penelitian Widyatama et al. (2017) menyatakan pendidikan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan karena sebagian besar pengelola keuangan tidak berpendidikan akuntansi dan tidak ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Kuncahyo & Dharmakarya

(2022) menyatakan pengalaman aparat desa bukan merupakan penentu keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Hal ini disebabkan adanya bantuan pendampingan kepada aparat desa. Pemerintah daerah bekerjasama dengan aparatur pengawas daerah aktif melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kapasitas aparatur desa. Dengan demikian meskipun latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan bidang pekerjaan pencatatan dan pelaporan keuangan, namun para pengelola keuangan desa cukup mampu menyesuaikan diri dan memenuhi pelaksanaan tugasnya.

Hasil penelitian Ali et al. (2023) menyatakan aparat desa yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi belum tentu mampu menyelesaikan permasalahan dalam laporan keuangan desa. Hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian Jannah (2021) yang menyatakan kompetensi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang tidak mengalami salah saji material dan kesalahan yang mungkin terjadi.

Hasil pengamatan menunjukkan sebagian besar proses pengelolaan keuangan sebenarnya hanya dijalankan oleh beberapa orang saja, salah satunya yaitu bendahara desa. Padahal aparat desa yang bertugas sebagai pengelola keuangan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, dan kepala seksi. Hal tersebut mungkin menyebabkan timbulnya kemungkinan bias dalam penelitian ini yang menjadi responden penelitian ini. Tidak semua aparat desa mendapatkan pelatihan karena tugas mengelola keuangan difokuskan pada bendahara desa. Penelitian Viani & Jaeni (2024) menunjukkan penatausahaan dan pertanggungjawaban menjadi lebih baik setelah bendahara desa diberikan pelatihan.

4.2.4.2 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa hubungan variabel Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,024 dengan nilai p-value sebesar 0,443 nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dengan T-Statistik 1,016 lebih kecil dari 1,960. Hasil ini berarti bahwa Komitmen Organisasi memiliki hubungan yang positif tetapi tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, Hipotesis H2 dalam penelitian ini dinyatakan ditolak.

Berdasarkan hasil analisis data hal ini sejalan dengan penelitian Panjaitan et al. (2022), Shakertie & Diansari (2018) dan Jannah (2021) yang menyatakan bahwa Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif tidak signifikan dikarenakan masih rendahnya komitmen yang dimiliki aparatur desa dalam pengelolaan dana desa seperti keyakinan terhadap tujuan organisasi, perasaan memiliki organisasi, mempertahankan keanggotaan organisasi, kesetiaan dalam organisasi dan kesediaan mengerahkan upaya atas nama organisasi.

Komitmen organisasi menjadikan individu berpihak pada organisasi, namun dengan berpihaknya individu pada organisasi belum dapat mewujudkan tujuan organisasi tanpa didukung dengan tindakan dalam mencapai tujuan organisasi tersebut dan sama halnya dalam mewujudkan akuntabilitas dalam mengelola dana desa. Pada pengelolaan keuangan desa memiliki komitmen saja belum cukup, aparatur harus mempunyai rasa tanggung jawab yang besar, mentaati regulasi yang

ada, dan mempunyai pengetahuan yang baik dalam mengelola keuangan desa (Novanti & Rohman, 2019).

4.2.4.3 Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa hubungan variabel Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,618 dengan nilai p-value sebesar 0,035 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dengan T-Statistik 2,499 lebih besar dari 1,960. Hasil ini menunjukkan bahwa Transparansi memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, Hipotesis H3 dalam penelitian ini dinyatakan diterima.

Pada temuan penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi (2020) menyimpulkan bahwa semakin Transparan Pengelolaan Dana Desa maka akan mendorong keberhasilan akuntabilitas keuangan dana desa. Hal ini membuktikan bahwa transparansi yang tinggi menunjukkan keberhasilan pengelolaan dana desa akan berjalan secara maksimal. Salah satu faktor utama dalam pengelolaan keuangan yaitu Keterbukaan, terutama dalam pengelolaan dana desa. Keterbukaan sangat diperlukan agar setiap masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah dan dapat memahami bagaimana pengelolaan dana desa yang ada di desanya masing-masing. Adanya keterbukaan tersebut agar tidak timbul rasa curiga atau rasa kurang percaya terhadap aparatur desa di setiap desa (Situngkir & Simarmata, 2022). Apabila semua aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah desa secara terbuka kepada masyarakat, maka keberhasilan pengelolaan dana desa akan maksimal.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan dari penelitian ini mengenai variabel Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi dan Transparansi terhadap Akutabilitas Pengelolaan Dana Desa pada desa-desa di Kecamatan Pangkalan Susu, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 9 kantor desa yang terdapat di Kecamatan Pangkalan Susu diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh parsial dan signifikan variabel Kompetensi Aparatur Desa (X1) terhadap Akutabilitas Pengelolaan Dana Desa pada desa-desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Susu.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 9 kantor desa yang terdapat di Kecamatan Pangkalan Susu diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh parsial dan signifikan variabel Komitmen Organisasi (X2) terhadap Akutabilitas Pengelolaan Dana Desa pada desa-desa yang ada di Kecamatan Pangkalan susu.
3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 9 kantor desa yang terdapat di Kecamatan Pangkalan Susu diketahui bahwa terdapat pengaruh parsial dan signifikan variabel Transparansi (X3) terhadap Akutabilitas Pengelolaan Dana Desa pada desa-desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Susu.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan Kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan akan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Bagi Desa

Aparatur desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Susu diharapkan agar lebih terampil dan cekatan dalam mengelola keuangan desa serta pendamping desa diharapkan dapat meningkatkan kompetensinya sehingga dalam mengelola dana desa akan semakin optimal dan menunjukkan keberhasilan yang maksimal seperti lebih giat lagi dalam mengikuti seminar atau bimbingan teknologi yang dilakukan setiap tahun oleh pihak-pihak terkait mengenai tahap penyusunan data, perencanaan anggaran, pengorganisasian, pelaksanaan hingga tahap pengawasan guna tidak terjadi penyelewengan dan korupsi yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Jika tertarik untuk melakukan penelitian yang sama, diharapkan untuk lebih mengembangkan/menambahkan variabel lain yang akan diteliti sebagai variabel pendukung yang dapat mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan juga menambah indikator maupun daftar pertanyaan yang akan digunakan agar hasil penelitian yang diperoleh akan semakin baik serta diharapkan pula dapat memperluas responden dan ruang lingkup penelitian agar lebih dapat digeneralisasikan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini terbatas yaitu hanya Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi dan Transparansi. Sedangkan masih banyak terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
2. Penelitian ini hanya meneliti pada subjek perangkat desa yang ada pada Kecamatan Pangkalan Susu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I. M. D. M. (2021). Populasi dan Sampel. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, 14(1), 103–116.
- Ali, S. P., Mahdalena, & Mahmud, M. (2023). *Economics and Digital Business Review Pengaruh Kompetensi Aparat Desa , Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa-Desa*. 4(2), 325–339.
- Amaliya, R., & Maryono. (2022). *Pengaruh Kompetensi , Sistem Pengendalian Internal , Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas*. 13(1), 122–133.
- Ando, R., Soleman, R., & Sinen, K. (2024). Participation , Organizational Commitment , Implementation of Village. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(2), 598–609.
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 280–344.
- Budiarti, P. A. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(3), 1–13.
- Dewi, E. S. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa. In *Universitas Widya Dharma* (Vol. 4, Issue 5).
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1269–1298. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p16>
- Furadantin, N. R. (2018). Analisis Data Menggunakan Aplikasi SmartPLS v.3.2.7 2018. *Academia (Accelerating the World's Research)*, 2. https://scholar.google.com/scholar?q=related:2uQwPffimx4J:scholar.google.com/&scioq=analisis+data+menggunakan+smartPLS&hl=id&as_sdt=0,5
- Hadi, S., & Syahrani, E. (2022). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa , Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Kasus Gampong Cot Nga Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen)*. 01(01), 56–67.
- Hafsah, & Diana, M. (2018). Analisis Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Hanum, Z. (2011). Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serang Bedagai. *Jurnal Ilmiah & Bisnis*, 10(2), 1–23.

- Hariani, N. K., Merawati, L. K., & Yuliasuti, I. A. N. (2022). *Kompetensi dan peran partisipasi masyarakat dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa*. 6(1), 78–99.
- Herman, dody, & Ilham. (2018). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sunggumanai Kabupaten Gowa. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 1–17. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Makassar
- Indraswari, nafadhila eka. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa , Partisipasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–15.
- Jannah, M. (2021). *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa dan Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Di Kecamatan Kayuagung*.
- Kuncahyo, H. D., & Dharmakarya, G. M. A. (2022). *Pengaruh kompetensi, peran aparat desa, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan mojogedang karanganyar jawa tengah*. 1(4), 299–319.
- Latuamury, J., & Tuankotta, A. M. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Komitmen Organisasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Teluk Ambon Baguala. *Manis: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 23–32. <https://doi.org/10.30598/manis.6.1.23-32>
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 8(1). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15334>
- Manisa, S. F., Manaroinsong, J., & Sumual, M. (2020). AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 8–12. <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i2.362>
- Mardiani, D., Sari, E. N., & Hanum, Z. (2024). Determinan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Dengan Partisipasi Stakeholder Sebagai Moderasi Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di kota Pematang Siantar. *Jurnal Inovasi Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 18–28.
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 118–130.
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 10(2), 273–288. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Nainggolan, E. P., Sholeha, D., & Indriyani, S. (2023). TINJAUAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM

PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI. *Jurnal Darma Agung*, 31(6), 254–263.

- Nislandi, N. A., & Munari, M. M. (2023). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Sidoarjo. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2), 143. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1518>
- Novanti, E., & Rohman, F. (2019). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 (Studi Empiris Pada Desa se Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara)*. 5, 1–18.
- Nurdin, Y., & Wijaya, I. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 2(1), 222–236. <https://doi.org/10.53088/jikab.v2i1.31>
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Panjaitan, R. S., Simanjuntak, A., Sembiring, Y. N., & Siahaan, S. B. (2022). *Info Artikel*. 8(1), 51–70.
- Princessa, S. T., Zulhelmy, & Nursida, N. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desapada Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Sumatera Barat. *Journal of Islamic Finance and Accounting Research*, 1(2), 17–28.
- Saragih, D. P., & Alpi, M. F. (2023). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Tata Kelola Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabiilitas Sebagai Intervening. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i1.3842>
- Sari, E. N. (2012). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap Good Governance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 12(2), 25–54.
- Sari, F. M., Ariyanti, R., & Notoatmojo, M. I. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Di Kabupaten Batang. *Ekombis: Jurnal Fakultas Ekonomi*, 8(2), 145. <https://doi.org/10.35308/ekombis.v8i2.6533>
- Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R. D. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Kinerja*, 20(2), 179–191. <https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1975>
- Shakertie, F. A., & Diansari, R. E. (2018). *PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI PERANGKAT DESA, KOMITMEN ORGANISASI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Pada Desa di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo)*.

- Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 93–101. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i2.2527>
- Situngkir, A., & Simarmata, B. I. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi, dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kabupaten Samosir). *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 5(2), 96–104. <https://doi.org/10.51510/jakp.v5i2.987>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Viani, S. D. L., & Jaeni. (2024). *stVILLAGE FUND MANAGEMENT AFFECTING FACTORS (CASE STUDY IN VILLAGES OF JEPARA DISTRICT)*. 7, 5001–5009.
- Wahjahanani, P., Muhammad Rizqi Zati, & Tuti Meutia. (2023). Pengaruh Komitmen Organisasi, Motivasi Aparatur dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Kampung di Kecamatan Seruway). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 4(6), 348–361. <https://doi.org/10.33059/jmas.v4i6.8880>
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati. (2017). *Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)*. 02(02), 1–20.
- Yanto, E., & Aqfir. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa. *Economy Deposit Journal (E-DJ)*, 2(2). <https://doi.org/10.36090/e-dj.v2i2.916>
- Zulkifli, Sandrayati, & Ariani, N. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim. *JEMBATAN (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, Dan Akuntansi)*, 6(1), 26–38. <https://doi.org/10.54077/jembatan.v6i1.55>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA-DESA KECAMATAN PANGKALAN SUSU

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Kepada Yth. Saudara/Saudari

Di Tempat

Dengan Hormat

Perkenalkan nama saya Kelly Davinci (2005170135) mahasiswa Program Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bersama ini saya memohon kesediaanya untuk mengisi daftar kuesioner yang diberikan. Informasi yang diberikan sebagai data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi pada Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya mohon untuk kesediaan Saudara/Saudari dalam membantu saya mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini bertujuan untuk kepentingan ilmiah, oleh karena itu jawaban atau pendapat yang Saudara/Saudari berikan sangat bermanfaat bagi pengembang ilmu. Saya menyadari permohonan ini sedikit mengganggu kegiatan Saudara/Saudari dalam kuesioner ini tidak ada hubungannya dengan status atau kedudukan dalam instansi, maka jawaban yang benar adalah jawaban yang menggambarkan keadaan Saudara/Saudari. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dan partisipasi Saudara/Saudari untuk mengisi kuesioner ini dalam waktu singkat.

Hormat Saya

Kelly Davinci

A. Identitas Responden

Mohon Bapak/Ibu mengisi dan memberikan tanda check-list (√) pada kotak yang tersedia.

- Nama : _____
- Umur : < 30 tahun 30 – 40 tahun > 40 tahun
- Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
- Pendidikan Terakhir : SMA D3 S1 S2
- Masa Kerja : < 2 tahun 2-5 tahun > 5 tahun

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Sebelum menjawab setiap pernyataan, mohon Bapak/Ibu membaca terlebih dahulu dengan baik dan benar.
2. Isilah kuesioner sesuai dengan kondisi perusahaan tempat Bapak/Ibu bekerja.
3. Pilihlah jawaban atau pendapat yang menurut Bapak/Ibu paling sesuai dengan memberi tanda checklist (√) pada kolom yang tersedia.

Keterangan :

- Kategori 5 : Sangat Setuju (SS)
- Kategori 4 : Setuju (S)
- Kategori 3 : Netral (N)
- Kategori 2 : Tidak Setuju (TS)
- Kategori 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)

A. Kuesioner Kompetensi Aparatur Desa

No	Pernyataan	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)
1	Aparatur desa mampu memahami siklus akuntansi dengan baik.					
2	Siklus Akuntansi selalu dimengerti oleh setiap perangkat desa					
3	Pengetahuan mengenai teknologi informasi mampu menunjang kemampuan setiap aparatur desa dalam melakukan pekerjaan.					
4	Aparatur desa mampu membuat jurnal untuk setiap transaksi dengan baik.					
5	Aparatur desa selalu mengikuti pelatihan teknis guna meningkatkan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan desa.					
6	Aparatur desa selalu mampu dalam mencari solusi apabila terjadi suatu permasalahan dalam pengelolaan dana desa					
7	Inisiatif aparatur desa dalam mengelola keuangan desa selalu dibutuhkan					
8	Aparatur desa memiliki rasa tanggungjawab atas segala pekerjaan yang diamanahkan padanya.					
9	Dapat melakukan pekerjaan dengan kualitas kerja dengan baik.					
10	Aparatur desa selalu bekerja dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang pegawai.					

B. Kuesioner Komitmen Organisasi

No	Pernyataan	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)
1	Aparatur desa selalu merasa menjadi bagian dari organisasi.					
2	Aparatur desa selalu dapat menemukan antara kesamaan nilai-nilai yang ada di diri sendiri dengan nilai-nilai yang ada pada organisasi ditempat aparatur desa bekerja.					
3	Aparatur desa selalu merasa permasalahan yang terjadi dalam organisasi juga menjadi permasalahan bagi dirinya sendiri.					
4	Aparatur desa selalu memiliki kesempatan dalam membangun karir pada pemerintahan desa.					
5	Aparatur desa selalu memiliki peluang dalam meningkatkan prestasi serta selalu dapat menunjukkan sikap yang positif dalam pemerintahan desa.					
6	Kantor desa selalu layak mendapatkan kesetiaan dari setiap perangkat desa.					
7	Aparatur desa selalu merasa belum banyak memberikan kontribusi dalam organisasi.					

C. Kuesioner Transparansi

No	Pernyataan	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)
1	Masyarakat selalu diikutsertakan dalam musyawarah rencana pengalokasian dana desa.					
2	Masyarakat mempunyai akses yang cukup dalam informasi rencana penggunaan dana desa.					
3	Pengelola dana desa terbuka mengenai seluruh informasi pengelolaan dana desa kepada seluruh masyarakat.					
4	Pengelola dana desa terbuka mengenai seluruh hasil pelaksanaan program desa kepada seluruh masyarakat.					
5	Tersedia akses yang mudah untuk memperoleh dokumen publik tentang dana desa.					
6	Transparansi pengelolaan dana desa dapat mengakomodasi dan meningkatkan aspirasi/usulan rakyat.					

D. Kuesioner Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

No	Pernyataan	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)
1	Pengelolaan keuangan desa telah disusun sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.					
2	Dalam Pengelolaan Keuangan Desa telah disajikan dengan penuh pertanggungjawaban (Akuntabilitas) dan penuh keterbukaan (Transparansi).					
3	Realisasi dana desa telah di informasikan melalui pembuatan spanduk maupun baliho yang ada di kantor desa setempat.					
4	Aparatur desa selalu tepat waktu dalam menyusun laporan keuangan desa.					
5	Dalam menyerahkan/menyampaikan laporan keuangan desa selalu dilakukan dengan tepat waktu dan secara menyeluruh.					
6	Dana desa yang digunakan selalu dicatat dengan penuh pertanggungjawaban (Akuntabilitas) dan penuh keterbukaan (Transparansi).					
7	Laporan keuangan yang disajikan memuat dan mengungkapkan informasi yang memadai.					
8	Informasi mengenai penyaluran dan desa selalu bisa didapat setiap waktu.					

Lampiran 1. 2 Data Responden

No	Responden				
	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan	Masa Kerja
1	Rido Ginting	> 40 thn	Laki-Laki	SMA	2-5 thn
2	Ahmad Azizi Darmawan	< 30 thn	Laki-Laki	S1	2-5 thn
3	Dian Utari	< 30 thn	Perempuan	S1	2-5 thn
4	Winda Utari	< 30 thn	Perempuan	SMA	2-5 thn
5	M. Arifin Samsudin	> 40 thn	Laki-Laki	SMA	2-5 thn
6	Dahlan	< 30 thn	Laki-Laki	D3	2-5 thn
7	Suci Efendi	< 30 thn	Perempuan	SMA	2-5 thn
8	Putri Widya Wati	< 30 thn	Perempuan	SMA	2-5 thn
9	Faisal Reza, S.T, S.H	> 40 thn	Laki-Laki	S1	< 2 thn
10	Suriani	> 40 thn	Perempuan	SMA	> 5 thn
11	Mardianto, S.T	30-40 thn	Laki-Laki	S1	2-5 thn
12	Fitria Dewi	> 40 thn	Perempuan	D3	> 5 thn
13	Iskandar	> 40 thn	Laki-Laki	SMA	2-5 thn
14	Yowanda, S.Pd	30-40 thn	Laki-Laki	S1	> 5 thn
15	Khairunnisa, S.Pd	< 30 thn	Perempuan	S1	2-5 thn
16	Evi Susanti Daulay, S.E	> 40 thn	Perempuan	S1	2-5 thn
17	Muhammad Sofian	> 40 thn	Laki-Laki	SMA	> 5 thn
18	Eva Farida Wati Simanjuntak	< 30 thn	Perempuan	SMA	> 5 thn
19	Sri Rahayu	30-40 thn	Perempuan	SMA	> 5 thn
20	Rosnawita	> 40 thn	Perempuan	SMA	> 5 thn
21	Muhammad Taufik Tarigan	> 40 thn	Laki-Laki	SMA	2-5 thn
22	Dudi Ariadi	> 40 thn	Laki-Laki	SMA	> 5 thn
23	Liyenti	30-40 thn	Perempuan	SMA	> 5 thn
24	Mariana	30-40 thn	Perempuan	SMA	> 5 thn
25	Arifin SUM	> 40 thn	Laki-Laki	SMA	2-5 thn
26	Bella Ariyani	< 30 thn	Perempuan	SMA	> 5 thn
27	Henri	> 40 thn	Laki-Laki	SMA	> 5 thn
28	Syapi'i	> 40 thn	Laki-Laki	SMA	> 5 thn
29	Suratno	> 40 thn	Laki-Laki	SMA	2-5 thn
30	T Rita Yuliani	> 40 thn	Perempuan	SMA	> 5 thn
31	Delfi Nazli	< 30 thn	Perempuan	SMA	> 5 thn
32	Rahman Maulana	< 30 thn	Laki-Laki	SMA	> 5 thn
33	Tahansyah Silalahi	> 40 thn	Laki-Laki	SMA	> 5 thn
34	Syahrial	30-40 thn	Laki-Laki	SMA	2-5 thn
35	Indah Fajarini	30-40 thn	Perempuan	SMA	2-5 thn
36	Mentari	30-40 thn	Perempuan	SMA	2-5 thn

Lampiran 1.3 Recap Data Penelitian Variabel Kompetensi Aparatur Desa

X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
4	4	3	3	3	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	2	4	3	3	2	3	4	4	4
3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
5	5	4	5	4	2	5	5	4	2
4	5	3	4	4	3	4	4	3	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	4	3	3	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	3	3	5	5	5	5	4	5
5	5	5	4	4	5	5	4	4	4
5	5	4	4	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	3	3	4	4	3
1	1	1	1	1	4	4	4	4	4
5	5	5	2	3	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	5	3	3	4	4	4	4	4	3
4	5	4	5	5	4	3	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
5	5	3	3	3	3	4	4	4	4
5	5	3	3	4	3	4	4	3	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	4	4	3	4	2	4	4
5	5	5	2	3	2	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	4	3	3	3	4
4	4	3	3	3	4	3	4	4	3
5	5	5	5	5	4	4	4	5	5
4	4	3	4	4	3	4	4	4	3
3	4	3	3	4	3	3	3	3	4
4	4	3	4	4	4	3	3	4	4
4	4	4	3	3	3	4	4	4	4
5	5	5	4	5	4	4	4	5	5
4	5	4	3	3	3	3	3	3	2

Lampiran 1. 4 Recap Data Penelitian Variabel Komitmen Organisasi

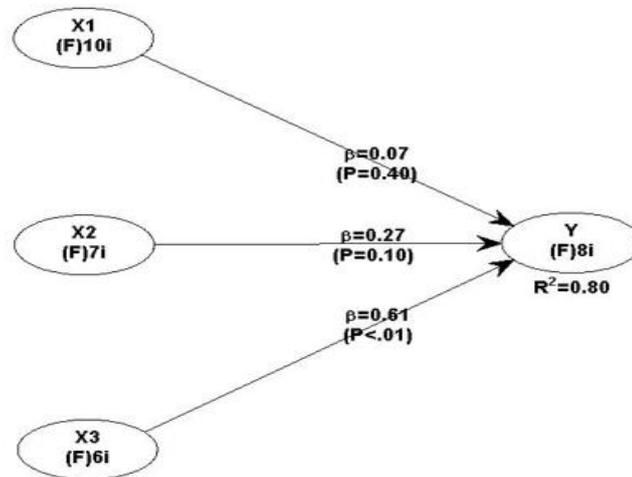
X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7
2	2	2	2	2	2	2
3	2	2	2	2	2	2
4	4	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
3	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	3	3	5	3	3	3
3	3	3	4	3	3	3
2	2	2	2	2	2	2
3	4	3	5	4	3	3
2	2	2	2	2	2	2
2	3	2	2	2	2	2
3	3	3	4	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	3	4	3	4
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	3	3	3
3	3	4	5	3	3	3
3	4	3	3	3	3	3
4	4	4	3	3	3	4
3	3	3	5	4	3	3
2	2	2	2	2	2	2
4	3	3	3	3	2	2
4	5	3	3	4	4	3
3	3	3	4	3	3	3
3	3	3	3	2	3	2
3	4	3	3	3	3	3
4	4	2	3	4	4	2
4	3	3	4	3	3	3
3	3	3	4	3	3	3
4	4	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
2	2	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4

Lampiran 1. 5 Recap Data Penelitian Variabel Transparansi

X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6
5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	5	4
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
3	3	4	3	4	4
3	3	3	3	3	3
4	3	5	5	4	5
4	4	4	3	4	4
5	5	5	5	5	5
4	4	4	3	4	4
5	5	5	5	5	5
5	5	5	3	3	4
5	4	4	5	5	5
5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	4	3
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3
4	4	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
3	3	4	3	5	4
4	4	4	3	4	4
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	3
4	4	4	5	5	5
4	4	4	4	4	4
5	4	3	4	4	4
4	4	4	4	4	4
5	4	3	3	3	5
4	4	3	3	5	4
4	4	3	3	4	3
4	4	4	4	4	4
4	4	4	3	3	4
4	5	5	5	5	5
4	3	3	3	3	3

Lampiran 1. 7 Output WarpPLS

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi Aparatur Desa	36	25.00	50.00	39.8889	6.20036
Komitmen Organisasi	36	14.00	28.00	21.4722	4.31268
Transparansi	36	18.00	30.00	24.4722	3.43500
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	36	24.00	40.00	32.6667	4.77493
Valid N (listwise)	36				



WarpPLS 8.0 - Indicator loadings and cross-loadings: View combined loadings and cross-loadings

Close Help

	X1	X2	X3	Y	Type (as defined)	SE	P value
X1.1	(0.103)	0.286	0.141	-0.896	Formative	0.262	0.348
X1.2	(0.176)	0.046	0.526	-0.718	Formative	0.230	0.225
X1.3	(0.777)	0.111	0.222	0.215	Formative	0.293	0.006
X1.4	(0.761)	0.201	0.307	-0.602	Formative	0.207	<0.001
X1.5	(0.720)	0.001	0.369	0.620	Formative	0.252	0.004
X1.6	(0.559)	0.800	-0.041	-0.426	Formative	0.264	0.021
X1.7	(0.601)	-0.017	-0.277	-0.494	Formative	0.218	0.005
X1.8	(0.642)	-0.378	-0.473	0.320	Formative	0.512	0.110
X1.9	(0.386)	-0.279	0.013	0.229	Formative	0.424	0.184
X1.10	(0.782)	-0.479	-0.384	0.401	Formative	0.363	0.022
X2.1	0.471	(0.654)	-0.037	0.034	Formative	0.215	0.002
X2.2	0.590	(0.634)	0.044	-0.691	Formative	0.156	<0.001
X2.3	-0.270	(0.588)	0.833	-0.488	Formative	0.198	0.003
X2.4	-0.213	(0.851)	-0.380	0.617	Formative	0.139	<0.001
X2.5	-0.245	(0.748)	0.039	0.143	Formative	0.222	<0.001
X2.6	0.155	(0.853)	-0.354	-0.143	Formative	0.150	<0.001
X2.7	-0.367	(0.796)	0.129	0.242	Formative	0.134	<0.001
X3.1	-0.185	0.452	(0.782)	-0.351	Formative	0.203	<0.001
X3.2	-0.063	-0.633	(0.392)	-0.082	Formative	0.187	0.022
X3.3	0.382	-0.312	(0.771)	0.248	Formative	0.282	0.005
X3.4	-0.189	0.292	(0.834)	0.062	Formative	0.214	<0.001
X3.5	-0.695	-0.233	(0.604)	-0.496	Formative	0.195	0.002
X3.6	0.512	0.638	(0.852)	0.426	Formative	0.143	<0.001
Y1	0.416	0.803	-0.895	(0.572)	Formative	0.276	0.023
Y2	-0.005	-0.602	0.232	(0.719)	Formative	0.374	0.032

Notes: Loadings are unrotated and cross-loadings are oblique-rotated. SEs and P values are for loadings. P values < 0.05 are desirable for reflective indicators.

	X1	X2	X3	Y	Type (as defined)	SE	P value
X1.5	(0.720)	0.001	0.389	0.820	Formative	0.252	0.004
X1.6	(0.559)	0.800	-0.041	-0.426	Formative	0.264	0.021
X1.7	(0.601)	-0.017	-0.277	-0.494	Formative	0.218	0.005
X1.8	(0.642)	-0.378	-0.473	0.320	Formative	0.512	0.110
X1.9	(0.386)	-0.279	0.013	0.229	Formative	0.424	0.184
X1.10	(0.762)	-0.479	-0.384	0.401	Formative	0.363	0.022
X2.1	0.471	(0.654)	-0.037	0.034	Formative	0.215	<0.001
X2.2	0.590	(0.634)	0.044	-0.691	Formative	0.156	<0.001
X2.3	-0.270	(0.588)	0.833	-0.488	Formative	0.198	0.003
X2.4	-0.213	(0.851)	-0.380	0.617	Formative	0.139	<0.001
X2.5	-0.245	(0.748)	0.039	0.143	Formative	0.222	<0.001
X2.6	0.155	(0.853)	-0.354	-0.143	Formative	0.150	<0.001
X2.7	-0.367	(0.796)	0.129	0.242	Formative	0.134	<0.001
X3.1	-0.165	0.452	(0.782)	-0.351	Formative	0.203	<0.001
X3.2	-0.063	-0.633	(0.392)	-0.082	Formative	0.187	0.022
X3.3	0.382	-0.312	(0.771)	0.248	Formative	0.282	0.005
X3.4	-0.189	0.292	(0.834)	0.062	Formative	0.214	<0.001
X3.5	-0.695	-0.233	(0.604)	-0.496	Formative	0.195	0.002
X3.6	0.512	0.038	(0.852)	0.426	Formative	0.143	<0.001
Y1	0.416	0.803	-0.895	(0.572)	Formative	0.276	0.023
Y2	-0.005	-0.602	0.232	(0.719)	Formative	0.374	0.032
Y3	-0.530	0.158	0.597	(0.807)	Formative	0.231	<0.001
Y4	-0.078	-0.683	1.247	(-0.288)	Formative	0.266	0.143
Y5	-0.099	-0.335	1.296	(0.187)	Formative	0.300	0.269
Y6	0.451	-0.083	-0.320	(0.671)	Formative	0.325	0.023
Y7	-0.082	0.106	0.294	(0.890)	Formative	0.166	<0.001
Y8	-0.060	-0.491	-0.093	(0.667)	Formative	0.186	<0.001

Notes: Loadings are unrotated and cross-loadings are oblique-rotated. SEs and P values are for loadings. P values < 0.05 are desirable for reflective indicators.

Correlations among lvs. with sq. rts. of AVEs

	X1	X2	X3	Y
X1	(0.736)	0.733	0.827	0.735
X2	0.733	(0.768)	0.783	0.656
X3	0.827	0.783	(0.834)	0.797
Y	0.735	0.656	0.797	(0.825)

Note: Square roots of average variances extracted (AVEs) shown on diagonal.

	X1	X2	X3	Y	Type (as defined)	SE	P value
X1.3	(0.870)	-0.059	0.076	0.304	Formative	0.160	<0.001
X1.4	(0.661)	0.318	0.446	-0.322	Formative	0.204	0.001
X1.5	(0.731)	-0.103	0.997	0.226	Formative	0.291	0.009
X1.7	(0.635)	-0.040	-0.607	-0.250	Formative	0.213	0.003
X1.8	(0.753)	-0.052	-0.949	0.134	Formative	0.504	0.072
X1.10	(0.743)	-0.025	0.016	-0.213	Formative	0.409	0.039
X2.1	0.400	(0.666)	0.012	-0.172	Formative	0.211	0.002
X2.2	0.505	(0.639)	0.731	-0.911	Formative	0.153	<0.001
X2.4	-0.018	(0.843)	-0.297	0.476	Formative	0.142	<0.001
X2.5	-0.756	(0.777)	0.629	-0.105	Formative	0.216	<0.001
X2.6	0.091	(0.869)	-0.115	-0.182	Formative	0.149	<0.001
X2.7	-0.082	(0.788)	-0.778	0.679	Formative	0.133	<0.001
X3.1	0.324	0.056	(0.779)	0.314	Formative	0.225	<0.001
X3.3	-0.067	-0.311	(0.786)	-0.228	Formative	0.283	0.004
X3.4	-0.658	0.250	(0.859)	0.000	Formative	0.209	<0.001
X3.6	0.403	-0.015	(0.905)	-0.072	Formative	0.133	<0.001
Y2	0.459	-0.377	-0.265	(0.781)	Formative	0.378	0.023
Y3	0.049	0.174	-0.323	(0.917)	Formative	0.170	<0.001
Y7	-0.294	0.141	0.756	(0.845)	Formative	0.176	<0.001
Y8	-0.208	0.021	-0.182	(0.745)	Formative	0.126	<0.001

Notes: Loadings are unrotated and cross-loadings are oblique-rotated. SEs and P values are for loadings. P values < 0.05 are desirable for reflective indicators.

	X1	X2	X3	Y
R-squared				0.666
Adj. R-squared				0.635
Composite reliab.	0.875	0.895	0.901	0.894
Cronbach's alpha	0.827	0.858	0.852	0.841
Avg. var. extrac.	0.542	0.590	0.695	0.680
Full collin. VIF	3.516	2.755	5.010	2.889
Q-squared				0.680
(No. diff. vals.)	13.000	24.000	11.000	13.000
(No. diff. vals./N)	0.361	0.667	0.306	0.361
Min	-3.318	-2.458	-2.674	-2.907
Max	0.637	0.972	0.612	0.655
Median	0.345	0.435	0.612	0.655
Mode	0.637	0.972	0.612	0.655
Skewness	-1.888	-1.053	-1.453	-1.524
Exc. kurtosis	2.939	-0.123	0.743	1.147
Unimodal-RS	Yes	No	No	Yes
Unimodal-KMV	Yes	Yes	Yes	Yes
Normal-JB	No	No	No	No
Normal-RJB	No	No	No	No
Histogram	View	View	View	View

Notes: Unimodal-RS = Rohatgi-Székely test of unimodality; Unimodal-KMV = Klaassen-Mokveld-van Es test of unimodality; Normal-JB = Jarque-Bera test of normality; Normal-RJB = robust Jarque-Bera test of normality; click on "View" cell to see corresponding histogram.

Path coefficients

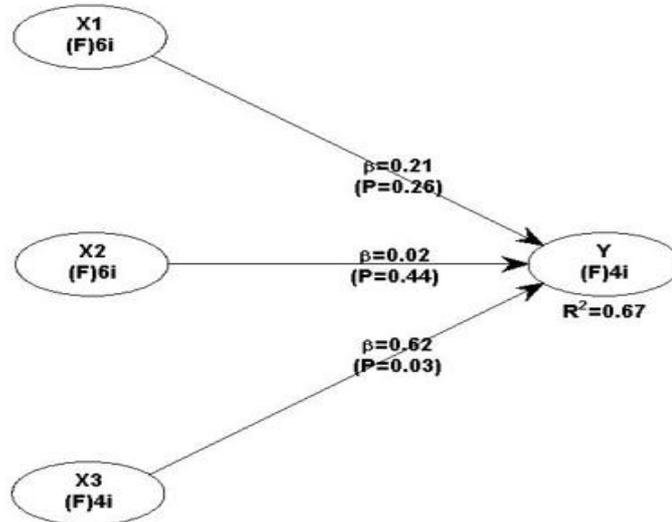
	X1	X2	X3	Y
X1				
X2				
X3				
Y	0.206	0.024	0.616	

P values

	X1	X2	X3	Y
X1				
X2				
X3				
Y	0.261	0.443	0.035	

Effect sizes for path coefficients

	X1	X2	X3	Y
X1				
X2				
X3				
Y	0.151	0.016	0.499	



Model fit and quality indices

Average path coefficient (APC)=0.283, P=0.004
 Average R-squared (ARS)=0.666, P=0.073
 Average adjusted R-squared (AARS)=0.635, P=0.126
 Average block VIF (AVIF)=3.366, acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3
 Average full collinearity VIF (AFVIF)=3.543, acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3
 Tenenhaus GoF (GoF)=0.646, small ≥ 0.1 , medium ≥ 0.25 , large ≥ 0.36
 Simpson's paradox ratio (SPR)=1.000, acceptable if ≥ 0.7 , ideally = 1
 R-squared contribution ratio (RSCR)=1.000, acceptable if ≥ 0.9 , ideally = 1
 Statistical suppression ratio (SSR)=1.000, acceptable if ≥ 0.7
 Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=1.000, acceptable if ≥ 0.7

General model elements

Outer model analysis algorithm: PLS Regression
 Default inner model analysis algorithm: Warp2
 Multiple inner model analysis algorithms used? No
 Resampling method used in the analysis: Jackknifing
 Number of data resamples used: 100
 Moderating effects calculation option: Two Stages
 Missing data imputation algorithm: Arithmetic: Mean Imputation
 Number of cases (rows) in model data: 36
 Number of latent variables in model: 4
 Number of indicators used in model: 20
 Number of iterations to obtain estimates: 6
 Range restriction variable type: None
 Range restriction variable: None
 Range restriction variable min value: 0.000
 Range restriction variable max value: 0.000
 Only ranked data used in analysis? No